

Kajian

KETIMPANGAN PEMBANGUNAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH

2012-2022



Kajian

**KETIMPANGAN PEMBANGUNAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH**

2012-2022

<https://jateng.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

KAJIAN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN PARIWISATA

PROVINSI JAWA TENGAH 2012 - 2022

No. ISBN : -
No. Publikasi : 33000.2394
Katalog : 8401025.33
Ukuran Buku : B5-JIS
Jumlah Halaman : xii + 52 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Gambar Kulit:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Diterbitkan oleh:

@Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Dicetak oleh :

CV. Surya Lestari

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

ANGGOTA TIM PENYUSUN :

Pengarah : Dr. Dadang Hardiwan, S.Si, M.Si

Penanggung Jawab : Didik Nursetyohadi, M.Agb.

Penyunting : Didik Nursetyohadi, M.Agb.

A'idzin, SE, M.A, M.Eng

Naskah : Hayu Wuranti, S.Si

Penyusun : Hayu Wuranti, S.Si

Design Tata Letak : Joko Mulyono

<https://jateing.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah ditujukan untuk mewujudkan ruang wilayah yang berdaya saing berbasis industri, dan pariwisata, dengan memperhatikan kelestarian alam dan pemerataan pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Perkembangan sektor pariwisata diharapkan dapat menjadi sektor kunci bagi perkembangan sektor lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Potensi dan kondisi sektor pariwisata yang berbeda menyebabkan terjadinya pola pertumbuhan ekonomi yang tak seimbang antar regional. Kompetisi sektor pariwisata antar wilayah memiliki implikasi pada munculnya disparitas antar wilayah. Di satu sisi, terdapat wilayah yang mampu berkembang lebih cepat karena menjadi tujuan pengembangan pariwisata. Di sisi lain, terdapat wilayah yang makin tertinggal karena tidak memiliki daya tarik pariwisata.

Penyusunan publikasi Kajian Ketimpangan Pembangunan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah 2012-2022 bertujuan untuk melihat ketimpangan pembangunan sektor pariwisata di Jawa Tengah. Secara lebih spesifik ada beberapa hal yang akan dilihat yaitu ketimpangan potensi daya tarik wisata, ketimpangan potensi ekonomi pariwisata serta ketimpangan sektor pariwisata dengan berbagai analisis.

Publikasi ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi yang berguna untuk berbagai tujuan dan memberikan informasi berharga bagi para pengguna data BPS, baik dari kalangan pemerintah maupun publik. Saran dan kritik perbaikan sangat diharapkan untuk penyempurnaan publikasi sejenis pada masa yang akan datang. Kepada semua pihak yang turut berperan dalam penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih.

Semarang, Desember 2023
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Jawa Tengah



Dadang Hardiwan

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
Ringkasan Eksekutif	xiii
Bab I Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Tujuan dan manfaat Penelitian	6
Bab II Studi Pustaka	
2.1. Kontribusi Ekonomi Pariwisata.....	7
2.2. Teori Basis Ekonomi	8
2.3. Keunggulan Komparatif dan Kompetitif	10
2.4. Spesialisasi Perekonomian	12
2.5. Teori Komponen Pertumbuhan Wilayah.....	13
Bab III Metodologi Penelitian	
3.1. Jenis dan Sumber Data	15
3.2. Metode Analisis.....	15
Bab IV Gambaran Umum Pariwisata	
4.1. Daya Tarik Wisata Jawa Tengah	27

4.2.	Potensi Ekonomi Pariwisata Jawa Tengah	32
Bab V	Ketimpangan Pembangunan Pariwisata	
5.1.	Kategori LQ	37
5.2.	Pemetaan Wilayah menurut Kategori LQ	39
5.3.	Analisis Dynamic Location Quotient (DLQ)	42
5.4.	Analisis Gabungan LQ Dan DLQ	43
5.5.	Analisis Shift Share	45
5.6.	Analisis Overlay	47
Bab VI	Kesimpulan	49
	Daftar Pustaka	51

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Matriks Perubahan LQ	18
Tabel 2.2.	Diagram Pemetaan Wilayah Menurut Kategori LQ	19
Tabel 2.3.	Analisis Shift Share Esteban Marquillas	25

<https://jateng.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Jawa Tengah Tahun 2012-2022	4
Gambar 4.1.	Sebaran Daya Tarik Wisata di Provinsi Jawa Tengah 2022	28
Gambar 4.2.	Sebaran Pengunjung Daya Tarik Wisata dan Event di Provinsi Jawa Tengah 2022	29
Gambar 4.3.	Sebaran Hotel dan Jasa Akomodasi Lainnya di Provinsi Jawa Tengah 2022	30
Gambar 4.4.	Sebaran Restoran/Rumah Makan di Provinsi Jawa Tengah 2021	31
Gambar 4.5.	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2022	34
Gambar 4.6.	Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata Jawa Tengah, 2012-2022	35
Gambar 4.7.	Pertumbuhan Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2021-2022	36
Gambar 5.1.	Sebaran Sektor Unggulan Industri Pariwisata Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2022	38
Gambar 5.2.	Sebaran wilayah menurut Diagram Pemetaan Wilayah Kategori LQ Sektor Pariwisata Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Tahun 2012-2022	41
Gambar 5.3.	Sebaran wilayah menurut Dynamic Location Quotient (DLQ) Sektor Pariwisata Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Tahun 2012-2022	43

Gambar 5.4.	Sebaran wilayah menurut Analisis Gabungan Location Quotient (LQ) Dan Dynamic Location Quotient (DLQ) Sektor Pariwisata Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Tahun 2012-2022	44
Gambar 5.5.	Sebaran wilayah menurut Analisis Shift Share Sektor Pariwisata Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Tahun 2012-2022	46
Gambar 5.6.	Sebaran wilayah menurut Analisis Overlay Sektor Pariwisata Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Tahun 2012-2022	48

<https://jateng.bps.go.id>

RINGKASAN EKSEKUTIF

Jawa Tengah memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan sektor pariwisata, namun jumlah daya Tarik wisata di tiap kabupaten/kota sangat bervariasi. Hotel dan restoran merupakan salah satu faktor penunjang utama kegiatan pariwisata. Baik hotel maupun restoran menyebar secara tidak merata di kabupaten/kota se Jawa Tengah. Hal ini menyebabkan potensi pariwisata di Kabupaten/Kota masih belum dapat digali secara optimal, sehingga kontribusinya terhadap pariwisata provinsi Jawa Tengah cenderung masih kecil.

Potensi dan kondisi sektor pariwisata yang berbeda menyebabkan terjadinya pola pertumbuhan ekonomi yang tak seimbang antar regional. Kompetisi sektor pariwisata antar wilayah memiliki implikasi pada munculnya disparitas antar wilayah. Di satu sisi, terdapat wilayah yang mampu berkembang lebih cepat karena menjadi tujuan pengembangan pariwisata. Di sisi lain, terdapat wilayah yang makin tertinggal karena tidak memiliki daya tarik pariwisata.

Hampir seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah mempunyai sektor unggulan di sektor pariwisata. Seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah memiliki daya saing atau potensi sektor pariwisata yang tinggi, hanya terdapat perbedaan dalam kecepatan pertumbuhan sektor pariwisata.

Pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah di harapkan mampu mempertahankan dan lebih mengembangkan sektor pariwisata. Potensi dan sarana penunjang kegiatan pariwisata perlu dikembangkan secara merata, agar seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah yang memiliki daya saing atau potensi sektor pariwisata yang tinggi, memiliki kecepatan pertumbuhan sektor pariwisata lebih seimbang.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah ditujukan untuk mewujudkan ruang wilayah yang berdaya saing berbasis pariwisata, industri, dan pariwisata, dengan memperhatikan kelestarian alam dan pemerataan pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Perkembangan sektor pariwisata diharapkan dapat menjadi sektor kunci bagi perkembangan sektor lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Peranan sektor pariwisata semakin penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan sektor pariwisata melalui penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja serta pengembangan usaha yang tersebar di berbagai wilayah di Jawa Tengah.

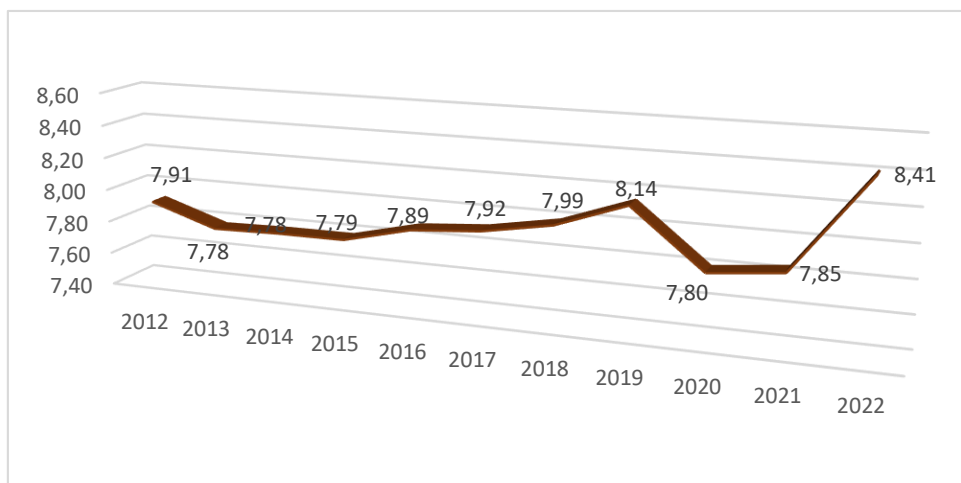
Upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam mendukung program pembangunan yaitu meningkatkan kontribusi pariwisata. Sektor pariwisata memiliki cakupan yang luas karena secara langsung maupun tidak langsung saling berkaitan dengan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat seperti usaha akomodasi, restoran, transportasi, perdagangan, jasa, dan lain-lainnya, sehingga sektor ini dapat menjadi penggerak roda perekonomian serta menjadi sektor andalan dalam pembangunan suatu wilayah (Wahyudi 2012). Oleh karena itu, sektor pariwisata mampu mengintegrasikan perekonomian dari berbagai dimensi yang dapat memberikan dampak secara langsung terhadap masyarakat berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya maupun politik.

Sektor pariwisata mampu menarik dan mendorong sektor ekonomi lain yang terkait, seperti hotel dan restoran, angkutan, industri kerajinan dan lain-lain. Melalui *multiplier effect*-nya, pariwisata dapat dan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Itulah mengapa, percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dapat dilakukan dengan mempromosikan pengembangan pariwisata.

Salah satu isu strategis pembangunan pariwisata adalah bagaimana meningkatkan kontribusi pariwisata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di daerah tujuan wisata. Secara umum, makin besar kontribusi sektor pariwisata terhadap “kue” perekonomian suatu wilayah, makin besar pula kontribusi sektor pariwisata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Oleh karena itu, perlu dikaji seberapa besar kontribusi pariwisata terhadap perekonomian dan bagaimana meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Jawa Tengah terus meningkat dari 7,91 persen pada tahun 2012 menjadi 8,41 persen pada tahun 2022. Pada tahun 2020 kontribusi sektor pariwisata mengalami penurunan menjadi 7,8 persen akibat berbagai kebijakan pembatasan di sektor pariwisata untuk mengantisipasi lonjakan pandemi covid-19. Dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian Jawa Tengah, pada tahun 2021 kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Jawa Tengah sedikit meningkat menjadi 7,85 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan terus meningkat pada tahun 2022 menjadi 8,41 persen.

Gambar 1.1. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Jawa Tengah Tahun 2012-2022



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah diolah, (dihitung berdasarkan IRTS)

Dalam mencapai pembangunan nasional, maka pengembangan wilayah perlu dilakukan agar memacu pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Oleh karena itu, tujuan pembangunan yang efektif dan efisien dapat dilakukan dengan menyesuaikan kondisi, potensi, dan permasalahan setiap daerah (Rahmana, 2010). Selain itu, analisis potensi daerah digunakan untuk memastikan investasi pemerintah daerah pada sektor lapangan usaha menjadi lebih terarah (Chan, 2014).

Pembangunan sektor pariwisata saat ini masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Hal tersebut disebabkan karena pola pengembangan sektor pariwisata yang sedang dan telah dilaksanakan oleh daerah terkesan kurang sistematis. Faktor-faktor tersebut menjadi penyebab dari kurang berkembangnya potensi sektor pariwisata dan berakibat rendahnya daya saing sektor pariwisata. Rendahnya daya saing sektor pariwisata daerah tersebut pada akhirnya menyebabkan arus masuk dari investasi sektor pariwisata menjadi kurang signifikan, sehingga diupayakan pengembangan potensi sektor pariwisata melalui pengembangan pariwisata unggulan.

Potensi dan kondisi sektor pariwisata yang berbeda menyebabkan terjadinya pola pertumbuhan ekonomi yang tak seimbang antar regional. Kondisi ini selaras dengan teori awal pembangunan ekonomi mengenai pertumbuhan tak seimbang. Potensi suatu wilayah dipandang memberikan manfaat ekonomi yang lebih tinggi dari pada wilayah lainnya. Pembangunan ekonomi yang dijalankan lebih menitikberatkan pada wilayah yang potensial tersebut. Ketidakseimbangan pola pembangunan ini juga disebabkan sumber daya investasi yang terbatas.

Kompetisi sektor pariwisata antar wilayah memiliki implikasi pada munculnya disparitas antar wilayah. Di satu sisi, terdapat wilayah yang mampu berkembang lebih cepat karena menjadi tujuan pengembangan pariwisata. Di sisi lain, terdapat wilayah yang makin tertinggal karena tidak memiliki daya tarik pariwisata. Dalam teorinya mengenai penyebab akumulasi perekonomian, Myrdal menyatakan bahwa

aglomerasi dan polarisasi pada pusat-pusat pertumbuhan dan wilayah-wilayah tertentu merupakan hal yang alamiah. Proses ekspansi itu akan berakumulasi. Myrdal menekankan pentingnya menghilangkan batas-batas area untuk mengurangi disparitas regional. Dengan meningkatkan daya tarik dan aktivitas ekonomi di satu daerah yang dapat menghilangkan batas area ini akan mengakibatkan difusi ekspansi kumulatif antar daerah (Higgins dan Savoie, 1995: 83-84).

1.2. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Diharapkan dengan meningkatnya pendapatan daerah akan diikuti dengan besarnya kontribusi PDRB pariwisata terhadap seluruh kegiatan perekonomian dengan memperhatikan kondisi setiap daerah. Dengan penelitian ini diharapkan dapat diketahui kabupaten/kota mana yang memiliki pariwisata potensial di Provinsi Jawa Tengah sehingga pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Tengah agar lebih efektif dan efisien meningkatkan perekonomian. Berdasarkan rumusan masalah tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kabupaten/kota mana yang sektor pariwisatanya menjadi basis (unggulan) di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022, untuk mengetahui kabupaten/kota mana yang sektor pariwisatanya menjadi basis (unggulan) di Provinsi Jawa Tengah pada masa yang akan datang, dan untuk mengetahui persebaran kabupaten/kota berdasarkan potensi pariwisata di Provinsi Jawa Tengah tahun 2022.

BAB II. STUDI PUSTAKA

2.1. Kontribusi Ekonomi Pariwisata

Dalam perhitungan kontribusi ekonomi dari sektor Perjalanan dan Pariwisata, terdapat beberapa komponen yang dapat diperhitungkan. Sebelumnya untuk membentuk metodologi di tingkat internasional yang dapat dikomparasikan, UNWTO menciptakan beberapa rekomendasi untuk statistik kepariwisataan mulai tahun 1978, 1993 dan 2008 dalam bentuk *International Recommendations on Tourism Statistics* (IRTS). Rekomendasi ini mencakup konsep dasar dan definisi mengenai berbagai aspek kepariwisataan seperti definisi pengunjung, jenis-jenis pariwisata, berbagai tujuan perjalanan wisata, dan konsep pengeluaran pariwisata. Konsep-konsep dan klasifikasi dalam IRTS ditujukan untuk menyamakan dasar analisis statistik sektor kepariwisataan.

Tourism Satellite Account (TSA: RMF 2008) merupakan rekomendasi internasional kedua setelah *International Recommendations for Tourism Statistics 2008* untuk statistik pariwisata yang dikembangkan dalam kerangka pikir yang konsisten dengan Sistem Penghitungan Nasional. Kedua rekomendasi statistik tersebut konsisten dengan satu sama lain dan menyediakan kerangka berpikir konseptual untuk mengukur dan menganalisis pariwisata sebagai aktivitas ekonomi. Sebagai alat statistik untuk akuntansi ekonomi pariwisata, TSA dapat dilihat sebagai kumpulan ringkasan tabel yang merepresentasikan data pariwisata yang berbeda-beda mulai dari pengeluaran pariwisata *inbound*, pengeluaran pariwisata *domestic* dan pengeluaran pariwisata *outbound*, pengeluaran pariwisata internal, akun produksi dari industri pariwisata, Nilai Tambah Bruto (NTB) dan Produk Domestik Bruto (PDB) yang berasal dari permintaan pariwisata, ketenagakerjaan, investasi, konsumsi pemerintah, dan indikator *non-moneter*.

Sektor pariwisata dalam TSA termasuk kluster unit produksi dalam berbagai industri yang memberikan barang dan jasa konsumsi yang diminta oleh pengunjung.

Sektor industri tersebut disebut sebagai industri pariwisata karena pengunjung mengkonsumsi bagian yang sangat besar dari persediaan industri tersebut di mana jika tidak ada pengunjung maka produksi dari industri tersebut akan berkurang secara signifikan.

2.2. Teori Basis Ekonomi

Salah satu teori ekonomi yang dikembangkan dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah adalah teori basis ekonomi. Menurut Arsyad (1999), teori ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu wilayah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar wilayah. Pertumbuhan industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor akan menghasilkan kekayaan wilayah dan menciptakan peluang kerja (*job creation*).

Sektor ekonomi potensial atau sektor unggulan dapat diartikan sebagai sektor perekonomian atau kegiatan usaha yang produktif dikembangkan sebagai potensi pembangunan serta dapat menjadi basis perekonomian suatu wilayah dibandingkan sektor-sektor lainnya, dimana perkembangan sektor-sektor lainnya dalam suatu keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung (Tjokroamidjoyo, 1976 : 126).

Sektor ekonomi potensial ini dapat berupa sektor basis, dimana menurut Glasson (1978) sektor basis merupakan sektor yang mengekspor barang dan jasa ke wilayah-wilayah diluar batas-batas perekonomian setempat. Besarnya pendapatan pengeluaran dalam sektor basis merupakan fungsi dari permintaan wilayah-wilayah lain. Tingkat pendapatan yang di peroleh sektor basis tercemin dari tingkat produksinya, sehingga kemampuan produksi sektor basis menjadi faktor penentu pendapatan wilayah. Adapun untuk sektor non-basis menyediakan barang dan jasa untuk masyarakat setempat termasuk kebutuhan sektor basisnya. Peningkatan

sektor basis ditentukan oleh pembelanjaan pendapatan sektor basis baik berupa faktor-faktor produksi maupun barang dan jasa yang dibutuhkan pekerja sektor basis. Dengan demikian perkembangan sektor non-basis tergantung pada perkembangan sektor basisnya (Glasson dalam Nugroho, 2001 : 15).

Perluasan kegiatan-kegiatan ekonomi disalurkan sektor basis kepada sektor-sektor non-basis yang mendukungnya secara langsung maupun tidak langsung. Keterkaitan langsung berupa aliran faktor-faktor produksi yang meliputi komoditas (bahan baku), tenaga kerja, modal dan jasa produksi. Keterkaitan tidak langsung berupa transaksi pengeluaran para pekerja sektor basis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan-kegiatan lokal yang melayani kebutuhan para pekerja tersebut turut terkena imbas perkembangan sektor basisnya, dengan demikian adanya keterkaitan yang kuat antara sektor basis dan sektor non-basis merupakan syarat mutlak untuk menyebarluaskan pertumbuhan dalam wilayah.

Pendekatan basis ekonomi sebenarnya berlandaskan pada pendapat bahwa yang perlu dikembangkan di sebuah wilayah adalah kemampuan memproduksi dan menjual hasil produksi tersebut secara efisien dan efektif. Wilayah mempunyai kesempatan untuk mengembangkan sumber daya yang dimiliki dengan memanfaatkan tenaga kerja yang ada termasuk dari luar wilayah dalam upaya meningkatkan peluang ekspor. Dalam analisisnya, teori basis ekonomi biasanya menggunakan data PDRB untuk mengidentifikasi dan menentukan sektor potensial. Apabila sektor potensial tersebut dikembangkan dengan baik akan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan wilayah secara optimal.

Mengacu pada teori ekonomi basis tersebut maka Arsyad (2008) menjelaskan bahwa teknik *location Quotient* dapat membagi kegiatan ekonomi suatu wilayah menjadi dua golongan yaitu:

1. Kegiatan sektor ekonomi yang melayani pasar di wilayah itu sendiri maupun di luar wilayah yang bersangkutan. Sektor ekonomi seperti ini dinamakan sektor ekonomi potensial (basis).
2. Kegiatan sektor ekonomi yang hanya dapat melayani pasar di wilayah itu sendiri dinamakan sektor ekonomi tidak potensial (non basis).

Menurut Syafrizal (2002), dalam kerangka teori basis ekspor ini, diketahui bahwa peningkatan ekspor terjadi apabila suatu wilayah memiliki keuntungan kompetitif (*competitive advantage*) yang cukup besar pada beberapa sektor ekonomi.

2.3. Keunggulan Komparatif dan Kompetitif

Dalam era otonomi daerah seperti sekarang ini, setiap wilayah memiliki kebebasan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan ekonominya. Untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan ekonomi di suatu wilayah sangat diperlukan informasi mengenai potensi ekonomi. Potensi ekonomi dapat diketahui dengan mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan berbagai sektor maupun subsektor ekonomi di wilayah tersebut. Sektor ekonomi yang memiliki keunggulan, memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor ekonomi lain untuk berkembang. Tumenggung (1996) memberi batasan bahwa sektor unggulan adalah sektor yang memiliki keunggulan komparatif (*comparatif advantages*) dan keunggulan kompetitif (*competitive advantages*) dengan produk sektor sejenis dari wilayah lain serta mampu memberikan nilai manfaat yang lebih besar. Sedangkan Mawardi (1997) mengartikan sektor unggulan adalah sektor yang memiliki nilai tambah yang besar terhadap perekonomian lain, serta memiliki permintaan yang tinggi, baik pasar lokal maupun pasar ekspor.

Istilah keunggulan komparatif mula-mula dikemukakan oleh David Ricardo (1917) sewaktu membahas perdagangan antara dua wilayah. Ricardo membuktikan bahwa apabila dua wilayah yang saling berdagang masing-masing mengkonsentrasikan diri untuk mengekspor barang yang memiliki keunggulan komparatif, maka kedua wilayah tersebut akan beruntung. Ide tersebut bukan saja bermanfaat dalam perdagangan internasional tetapi juga sangat penting diperhatikan dalam ekonomi regional.

Pengetahuan akan keunggulan komparatif suatu wilayah dapat digunakan para penentu kebijakan untuk mendorong perubahan struktur ekonomi wilayah ke arah sektor yang mengandung keunggulan komparatif. Jadi, apabila sektor yang memiliki keunggulan komparatif bagi suatu wilayah telah teridentifikasi maka pembangunan sektor tersebut dapat disegerakan tanpa menunggu tekanan mekanisme pasar yang sering berjalan terlambat (Tarigan, 2003).

Pada masa era perdagangan bebas seperti sekarang ini, keunggulan kompetitif mendapat perhatian lebih besar daripada keunggulan komparatif. Keunggulan kompetitif menunjukkan kemampuan wilayah untuk memasarkan produknya ke luar wilayah. Dalam analisis ekonomi regional, keunggulan kompetitif dimaknai oleh kemampuan daya saing kegiatan ekonomi di suatu wilayah terhadap kegiatan ekonomi yang sama di wilayah lainnya. Keunggulan kompetitif merupakan cermin dari keunggulan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah terhadap wilayah lainnya yang dijadikan "*benchmark*" dalam suatu kurun waktu (Thoha, 2000). Dalam kaitannya dengan keunggulan kompetitif, maka keunggulan komparatif suatu kegiatan ekonomi dapat dijadikan suatu pertanda awal bahwa kegiatan ekonomi tersebut punya prospek untuk juga memiliki keunggulan kompetitif. Jika suatu sektor memiliki keunggulan komparatif karena besarnya potensi sektor tersebut maka kebijakan yang diprioritaskan bagi pengembangan kegiatan ekonomi tersebut dapat berimplikasi kepada terciptanya keunggulan kompetitif. Kegiatan ekonomi

yang memiliki keunggulan komparatif sekaligus keunggulan kompetitif akan sangat menguntungkan perekonomian suatu wilayah.

Terkait dengan keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif, maka berdasarkan kegiatan ekonominya suatu wilayah dapat saja memiliki kedua jenis keunggulan tersebut secara bersama-sama.

Hal ini sangat dipengaruhi oleh satu atau gabungan beberapa faktor berikut ini (Tarigan, 2003) :

1. Memiliki potensi sumber daya alam
2. Penguasaan masyarakat terhadap teknologi mutakhir dan keterampilan-keterampilan khusus
3. Aksesibilitas wilayah yang baik
4. Memiliki market yang baik atau dekat dengan market
5. Wilayah yang memiliki sentra-sentra produksi tertentu atau terdapatnya aglomerasi dari berbagai kegiatan ekonomi.
6. Ketersediaan buruh yang cukup dan memiliki keterampilan baik dengan upah yang relatif rendah.
7. Mentalitas masyarakat yang baik untuk pembangunan : jujur, mau terbuka, bekerja keras, dapat diajak bekerja sama dan disiplin
8. Kebijakan pemerintah yang mendukung pada terciptanya keunggulan-keunggulan suatu kegiatan ekonomi wilayah.

2.4. Spesialisasi Perekonomian

Perekonomian suatu wilayah dikatakan terspesialisasi jika suatu wilayah memprioritaskan pengembangan suatu sektor ekonomi melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung terhadap kemajuan sektor tersebut (Muzamil, 2001).

Pengembangan sektor prioritas tersebut dapat dilakukan melalui investasi dan peningkatan sumber daya manusia pada sektor tersebut.

Spesialisasi dalam perekonomian merupakan hal yang cukup penting dalam rangka pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dikatakan, jika suatu wilayah memiliki spesialisasi pada sektor-sektor tertentu maka wilayah tersebut akan memiliki keunggulan kompetitif dari spesialisasi sektor tersebut (Soepono,1993).

Beberapa ahli ekonomi mulai memperhitungkan efek spesialisasi terhadap perekonomian suatu wilayah. Menurut Kuncoro (2002), salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk meningkatkan keterkaitan antar wilayah adalah melalui proses pertukaran komoditas antar wilayah. Hal ini dapat ditempuh melalui penciptaan spesialisasi antar wilayah.

2.5. Teori Komponen Pertumbuhan Wilayah

Tarigan (dalam Sanjaya, 2009) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi.

Untuk mengidentifikasi sumber atau komponen pertumbuhan wilayah, biasanya digunakan analisis shift share. Dalam hal ini, analisis shift share diartikan sebagai salah satu teknik kuantitatif yang biasa digunakan untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah relatif terhadap struktur ekonomi wilayah administratif yang lebih tinggi sebagai pembanding atau referensi.

Untuk tujuan tersebut, analisis ini menggunakan tiga informasi dasar yang berhubungan satu sama lain yaitu:

Pertama, pertumbuhan ekonomi referensi propinsi atau nasional (*nasional growth effect*) yang menunjukkan bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional terhadap perekonomian daerah.

Kedua, pergeseran proporsional (*proportional shift*), yang menunjukkan perubahan relatif kinerja suatu sektor di daerah tertentu terhadap sektor yang sama di referensi propinsi atau nasional.

Ketiga, Pergeseran deferensial (*diferential shift*) yang memberikan informasi dalam menentukan seberapa jauh daya saing industri daerah (lokal) dengan perekonomian yang dijadikan referensi. Jika pergeseran suatu industri adalah positif, maka industri tersebut relatif lebih tinggi daya saingnya dibandingkan industri yang sama pada perekonomian yang dijadikan referensi. Pergeseran deferensial ini disebut juga pengaruh keunggulan kompetitif (Sanjaya, 2009).

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Data PDRB sektor pariwisata merupakan data yang bersumber dari BPS Provinsi Jawa Tengah yang dihitung dengan metode IRTS. Data lain yang digunakan dalam analisis ini berupa data primer dan data sekunder berupa data yang dikumpulkan dari publikasi maupun dokumentasi cetak dan elektronik dari instansi pengumpul data seperti BPS dan sumber-sumber lain yang terkait.

3.2. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk mengidentifikasi tingkat disparitas dan sektor unggulan. Sedangkan analisis kualitatif digunakan untuk memperkuat dan melengkapi analisis kuantitatif.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Location Quotient (LQ), Pemetaan Wilayah menurut Kategori LQ, Dynamics Location Quotient (DLQ), Analisis Gabungan LQ dan DLQ, Shift Share serta Analisis Overlay.

a. Location Quotient (LQ)

Location quotient (LQ) digunakan untuk menentukan sektor basis dan non basis, dengan tujuan untuk melihat keunggulan komparatif suatu daerah dalam menentukan sektor andalannya. Sektor basis adalah sektor ekonomi yang mampu untuk memenuhi kebutuhan baik pasar domestik daerah itu sendiri maupun pasar luar. Artinya sektor ini dalam aktivitasnya mampu memenuhi kebutuhan daerah sendiri maupun daerah lain dan dapat dijadikan sektor unggulan. Sedangkan sektor non basis merupakan sektor ekonomi yang hanya mampu memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri.

Sektor basis menghasilkan barang dan jasa yang dapat dijual keluar daerah sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah tersebut dan secara berantai akan meningkatkan investasi baru dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, peningkatan pendapatan tersebut juga akan meningkatkan permintaan produk barang/jasa baik dari sektor basis maupun sektor non basis. Dengan dasar ini maka sektor basis perlu diprioritaskan untuk dikembangkan dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Jika koefisien LQ suatu sektor ≥ 1 berarti sektor tersebut mempunyai potensi atau termasuk sektor basis. Sektor tersebut memiliki spesialisasi dan terkonsentrasi di daerah tersebut. Jika koefisien LQ suatu sektor < 1 berarti sektor tersebut kurang mempunyai potensi atau bukan termasuk sektor basis. Sektor tersebut tidak berspesialisasi dan tidak terkonsentrasi di daerah tersebut. Jika koefisien LQ = 1 berarti tingkat spesialisasi sektor tersebut sama dengan daerah tingkat atasnya. Rumus LQ adalah:

$$LQ = \frac{Y_i/S_i}{Y_n/S_n}$$

Dimana:

LQ = Indeks *Location Quotient*

Y_i = PDRB Sektor Pariwisata Kabupaten/Kota

S_i = Total PDRB Kabupaten/Kota

Y_n = PDRB Sektor Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

S_n = Total PDRB Provinsi Jawa Tengah

Untuk menghitung LQ sektor pariwisata kabupaten/kota dapat dilakukan dengan mensubstitusi angka PDRB Provinsi Jawa Tengah dengan angka PDRB Kabupaten/Kota dan angka PDRB Provinsi Jawa Tengah dengan angka PDRB Kabupaten/Kota.

b. Pemetaan Wilayah menurut Kategori LQ

Formula LQ tersebut bersifat statis atau *Static Location Quotients* (SLQ) karena hanya melihat satu periode atau titik waktu saja. Model ini lemah karena tidak mampu melihat perubahan spesialisasi secara periodik. Model tidak dapat melihat apakah suatu sektor yang unggul pada tahun $t-n$ masih tetap menjadi sektor unggulan pada tahun t . Demikian pula, model tidak mengakomodasi jika sektor yang belum unggul pada saat ini akan menjadi sektor unggulan di masa yang akan datang. Pada analisis ini, nilai SLQ yang dipergunakan adalah rata-rata SLQ dari setiap SLQ yang dihasilkan pada setiap periode tahun penelitian.

Alternatif lain dari SLQ adalah model LQ yang dikembangkan oleh Bank Dunia. Cara lain untuk menggunakan LQ dalam pengambilan keputusan ekonomi regional adalah dengan melihat bagaimana nilai LQ berubah sepanjang tahun (dinamis). Nilai dari perubahan LQ ini menyediakan informasi yang bernilai apakah suatu subsektor ekonomi suatu daerah meningkat atau turun konsentrasinya secara relatif terhadap daerah lain. Untuk menghasilkan nilai perubahan LQ tersebut, Dinc (2002) menggunakan formula sebagai berikut:

$$\Delta LQ = \frac{LQ_{t+n} - LQ_t}{LQ_t}$$

Dinc (2002) menyatakan bahwa dari hasil ΔLQ tersebut, subsektor ekonomi dapat dikategorikan menjadi 4 kategori. Pada matriks di bawah ini, nilai ΔLQ pada tahun terakhir mungkin akan besar dan terdapat kecenderungan meningkat, dimana hal ini merupakan situasi yang diharapkan (sel B). Jika nilai ΔLQ dapat besar tetapi mengalami penurunan sepanjang waktu, maka pengambil kebijakan perlu memberikan perhatian pada sektor ini (sel A). LQ dapat pula kecil dan meningkat atau menurun sepanjang waktu.

Tabel 2.1. Matriks Perubahan LQ

		Perubahan LQ	
		Menurun	Meningkat
Nilai LQ	Tinggi	A	B
	Rendah	C	D

Sumber: Dinc (2002)

Hasil penentuan kategori ini memberikan alat analisis yang penting bagi pengambilan kebijakan ekonomi karena setiap kategori akan memerlukan pendekatan pembangunan ekonomi yang berbeda. Sebagai misal, suatu daerah akan berfokus pada sektor ekonomi yang memiliki LQ tinggi. Jika nilai LQ sektor tersebut mengalami penurunan, maka akan berdampak menciptakan potensi masalah pembangunan ekonomi daerah. Demikian pula, jika LQ suatu sub sektor relatif kecil tetapi menunjukkan adanya pertumbuhan, maka sektor ini perlu mendapat perhatian khusus. Jika suatu sektor ekonomi memperlihatkan penurunan LQ, maka pemerintah daerah perlu mencari penyebabnya dan membuat program kebijakan yang dapat menghentikan penurunan LQ sektor tersebut atau paling tidak memperlambatnya.

Hasil indeks LQ dalam analisis ini dipergunakan sebagai cerminan potensi lebih dari suatu daerah secara relatif terhadap daerah lainnya. Pemetaan potensi pariwisata di Jawa Tengah dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori:

1. Wilayah yang memiliki tingkat persaingan yang rendah dan sekaligus kurang memiliki potensi untuk bersaing dengan daerah lain dalam sektor pariwisata. Daerah dengan klasifikasi ini dalam analisis LQ dikategorikan sebagai daerah dengan SLQ rendah dan Δ LQ rendah.

2. Wilayah yang memiliki tingkat persaingan tinggi tetapi kurang memiliki potensi untuk bersaing dengan daerah lain dalam sektor pariwisata atau potensi bersaingnya mengalami penurunan. Daerah dengan klasifikasi ini dalam analisis LQ dikategorikan sebagai daerah dengan SLQ tinggi dan Δ LQ rendah
3. Wilayah yang memiliki tingkat persaingan rendah tetapi terhitung memiliki potensi yang kemampuan cukup untuk bersaing dengan daerah lain dalam sektor pariwisata. Daerah dengan klasifikasi ini dalam analisis LQ dikategorikan sebagai daerah dengan SLQ rendah dan Δ LQ tinggi.
4. Wilayah yang memiliki tingkat persaingan tinggi dan sekaligus memiliki potensi yang kemampuan cukup untuk bersaing dengan daerah lain dalam sektor pariwisata. Daerah ini dapat merupakan daerah percontohan sektor pariwisata. Daerah dengan klasifikasi ini dalam analisis LQ dikategorikan sebagai daerah dengan SLQ tinggi dan Δ LQ tinggi.

Peta daerah dengan 4 klasifikasi tersebut digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.2. Diagram Pemetaan Wilayah Menurut Kategori LQ

Δ LQ	SLQ < 1 ; Δ LQ > 0	SLQ > 1 ; Δ LQ > 0
	SLQ < 1 ; Δ LQ < 0	SLQ > 1 ; Δ LQ < 0
LQ		

Sumber: Dinc (2002), modifikasi

C. Dynamics Location Quotient (DLQ)

Dynamic Location Quotient (DLQ) adalah modifikasi dari LQ dengan mengakomodasi faktor laju pertumbuhan keluaran sektor ekonomi dari waktu ke waktu. Karena nilai LQ tidak dapat digunakan untuk memprediksi basis dan non basisnya suatu sektor pada masa yang akan datang. Nilai DLQ dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (Nugroho,2010):

$$DLQ = \left\{ \frac{(1 + g_{in}) / (1 + g_n)}{(1 + G_i) / (1 + G_n)} \right\}^t$$

Keterangan :

g_{in} = rata-rata laju pertumbuhan PDRB sektor pariwisata di provinsi

g_n = rata-rata laju pertumbuhan PDRB di provinsi

G_i = rata-rata laju pertumbuhan sektor/ sub sektor pariwisata di nasional

G_n = rata-rata laju pertumbuhan PDRB total nasional

t = tahun penelitian

Kriteria :

- a. $DLQ > 1$, berarti potensi perkembangan sektor/sub sektor pariwisata di daerah lebih cepat dibandingkan sektor yang sama di daerah referensi.
- b. $DLQ < 1$, berarti potensi perkembangan sektor/sub sektor pariwisata di daerah lebih lambat dibandingkan sektor yang sama di daerah referensi.
- c. $DLQ = 1$, berarti potensi perkembangan sektor/sub sektor pariwisata di daerah sama dengan sektor yang sma di daerah referensi.

D. Analisis Gabungan LQ dan DLQ

Untuk melihat perubahan posisi yang dialami sektor perekonomian dan sektor pariwisata digunakan analisis gabungan metode LQ dan DLQ, dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Jika nilai $LQ > 1$ dan $DLQ \geq 1$, berarti sektor pariwisata tetap menjadi basis baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.
- b. Jika nilai $LQ > 1$ dan $DLQ < 1$, berarti sektor pariwisata telah mengalami perubahan posisi dari basis menjadi non basis pada masa yang akan datang.
- c. Jika nilai $LQ \leq 1$ dan $DLQ \geq 1$, berarti sektor pariwisata telah mengalami reposisi dari non basis menjadi basis pada masa yang akan datang.
- d. Jika nilai $LQ \leq 1$ dan $DLQ < 1$, berarti sektor pariwisata tetap menjadi non basis baik pada masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang.

E. Analisis Shift Share

Analisis Shift Share digunakan untuk mengetahui sektor-sektor yang memiliki keunggulan kompetitif dan spesialisasi di suatu daerah. Shift Share dirumuskan sebagai:

$$G_{ij} = N_{ij} + P_{ij} + D_{ij}$$

$$N_{ij} = Y_{ij} \cdot r_n$$

$$P_{ij} = Y_{ij} (r_{in} - r_n)$$

$$D_{ij} = Y_{ij} (r_{ij} - r_{in})$$

$$r_{ij} = (Y_{ijt} - Y_{ij}) / Y_{ij}$$

$$r_{in} = (Y_{int} - Y_{in}) / Y_{in}$$

$$r_n = (Y_{nt} - Y_n) / Y_n$$

$$PBij = Pij + Dij$$

Dimana:

Gij : Perubahan PDRB pariwisata di kabupaten/kota

Nij : Komponen Regional pariwisata di kabupaten/kota

Pij : Komponen Proportional Shift pariwisata di kabupaten/kota

Dij : Komponen Differential Shift pariwisata di kabupaten/kota

PBij : Komponen Net Shift pariwisata di kabupaten/kota

Yij : PDRB pariwisata tahun awal di kabupaten/kota

Yin : PDRB pariwisata tahun awal di provinsi Jawa Tengah

Yn : PDRB total tahun awal di provinsi Jawa Tengah

Yijt : PDRB pariwisata tahun akhir di kabupaten/kota

Yint : PDRB pariwisata tahun akhir di provinsi Jawa Tengah

Ynt : PDRB total tahun akhir di provinsi Jawa Tengah

Untuk menghitung Shift Share provinsi Jawa Tengah dapat dilakukan dengan mensubstitusi angka PDRB kabupaten/kota dengan angka PDRB provinsi Jawa Tengah dan angka PDRB provinsi Jawa Tengah dengan angka PDRB Nasional. Peningkatan nilai tambah bruto (PDRB) sektor pariwisata di suatu wilayah (Gij) melalui analisis Shift Share dapat didekomposisi menjadi 3 komponen yaitu:

1. Regional Share (Nij) merupakan komponen pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh faktor luar. Sebagai contoh peningkatan kegiatan ekonomi daerah akibat kebijaksanaan yang diambil pemerintah Provinsi yang berlaku pada seluruh daerah di provinsi tersebut.
2. Proportional Shift (Pij) merupakan komponen pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh struktur ekonomi daerah yang baik, yaitu

berspesialisasi pada sektor yang pertumbuhannya cepat. Selain itu komponen pertumbuhan proporsional tumbuh karena perbedaan sektor dalam permintaan produk akhir, perbedaan dalam ketersediaan bahan mentah, perbedaan dalam kebijakan ekonomi serta perbedaan dalam struktur dan keragaman pasar.

3. Differential Shift (Dij) merupakan komponen pertumbuhan ekonomi daerah karena kondisi spesifik daerah yang bersifat kompetitif. Unsur pertumbuhan ini merupakan keuntungan kompetitif daerah yang dapat mendorong pertumbuhan ekspor daerah. Disamping itu, komponen Pergeseran bersih (PBij) yang merupakan penjumlahan Proportional Shift (Pij) dan Different Shift (Dij), dapat digunakan untuk mengidentifikasi pertumbuhan sektor ekonomi.

Dalam analisis pertumbuhan ekonomi regional komponen proportional shift (Pij) dan differential shift (Dij) lebih penting dibanding komponen regional share (Nij). Hal ini disebabkan karena komponen Dij digunakan untuk melihat perubahan pertumbuhan dari suatu kegiatan di wilayah studi terhadap kegiatan tersebut di wilayah referensi. Dari perubahan tersebut akan dapat dilihat berapa besar penambahan atau pengurangan pendapatan dari kegiatan tersebut. Sedangkan komponen Pij untuk melihat perubahan pertumbuhan suatu kegiatan di wilayah referensi terhadap kegiatan total (PDRB) di wilayah referensi. Klasifikasi wilayah/sektor berdasarkan Proportional Shift (Pij) dan Different Shift (Dij) dapat dikategorikan dalam 4 kategori yaitu:

1. Kategori I : Pij positif dan Dij positif merupakan sektor/wilayah dengan pertumbuhan sangat pesat.
2. Kategori II : Pij negatif dan Dij positif merupakan sektor/wilayah dengan kecepatan pertumbuhan terhambat namun berkembang.

3. Kategori III : Pij negatif dan Dij negatif merupakan sektor/wilayah dengan daya saing lemah dan kontribusi rendah.
4. Kategori IV : Pij positif dan Dij negatif merupakan sektor/wilayah dengan kecepatan pertumbuhan terhambat namun cenderung berpotensi.

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat spesialisasi perekonomian di suatu daerah juga dapat dilakukan dengan modifikasi analisis Shift Share Estaban Marguillas. Persamaan Shift Share menurut Estaban Marguillas mengandung unsur baru yang diberi notasi Y^*_{ij} didefinisikan sebagai suatu variabel wilayah (Y_{ij}), bila struktur wilayah sama dengan struktur wilayah atasnya atau $Y_{ij} = Y^*_{ij}$ maka Y^*_{ij} dirumuskan menjadi:

$$Y^*_{ij} = Y_j (Y_{in}/Y_n)$$

Pengaruh efek alokasi (*allocation effect*) belum dijelaskan dari suatu variabel wilayah untuk sektor i di wilayah j (A_{ij}), untuk mengetahui efek alokasi tersebut didekati dengan menggunakan rumus:

$$A_{ij} = (Y_{ij} - Y^*_{ij}) (r_{ij} - r_{in})$$

dimana:

$(Y_{ij} - Y^*_{ij})$: menggambarkan tingkat spesialisasi sektor i di suatu wilayah, jika $r_{ij} > r_{in}$.

$(r_{ij} - r_{in})$: menggambarkan tingkat keunggulan kompetitif sektor i di suatu wilayah.

Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa A_{ij} sebagai pengaruh alokasi dapat dilihat dalam dua bagian yaitu tingkat spesialisasi sektor i di wilayah j ($Y_{ij} - Y^*_{ij}$) yang dikalikan dengan keunggulan kompetitif ($r_{ij} - r_{in}$). Persamaan tersebut dapat bermakna bahwa bila suatu wilayah mempunyai suatu spesialisasi di sektor-sektor tertentu, maka sektor-sektor tersebut pasti akan menikmati pula keunggulan kompetitif yang lebih baik.

Dapat dilihat bahwa komponen keunggulan kompetitif dibagi menjadi keunggulan kompetitif karena adanya homothetic employment dan keunggulan kompetitif karena efek alokasi. Adapun kriteria penilaian untuk analisis shiftshare ini adalah sebagai berikut:

- a. Bila nilai koefisien shift-share lebih besar atau sama dengan 1, maka disebut sebagai sektor kompetitif.
- b. Bila nilai koefisien shift-share kurang dari 1, maka disebut sebagai sektor tidak kompetitif.

Selanjutnya koefisien yang memenuhi kriteria diberi notasi (+), sementara yang tidak memenuhi kriteria diberi notasi (-). Untuk kriteria yang diambil dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Analisis Shift Share Esteban Marquillas

Kode	Kriteria	Efek Alokasi	Komponen	
		Aij	Spesialisasi (Yij-Y*ij)	Keunggulan Kompetitif (rij - rin)
1.	Tidak memiliki keunggulan kompetitif namun terspesialisasi	-	+	-
2.	Tidak memiliki keunggulan kompetitif dan tidak terspesialisasi	+	-	-
3.	Memiliki keunggulan kompetitif namun tidak terspesialisasi	-	-	+
4.	Memiliki keunggulan kompetitif dan terspesialisasi	+	+	+

F. Analisis Overlay

Analisis Overlay dapat digunakan untuk menentukan sektor unggulan dengan menggabungkan hasil dari metode analisis LQ dan *Shift Share*. Nilai *Shift Share* yang digunakan untuk analisis kuadran adalah *Differential Shift (Dij)*. Tujuan dari analisis kuadran yaitu untuk melihat deskripsi kegiatan ekonomi yang potensial berdasarkan kriteria kontribusi dan kriteria pertumbuhan.

Berdasarkan gabungan analisis LQ dan Shift Share dapat disusun analisis overlay untuk menentukan mendeskripsikan klasifikasi dan tipologi daerah. Klasifikasi daerah berdasarkan sektor basis dan non basis dengan pertumbuhan cepat atau lambat, dengan menggabungkan LQ dengan Differential Shift (*Dij*) akan diperoleh:

- Klasifikasi I : andalan jika sektor basis ($LQ \geq 1$) dan tumbuh cepat ($Dij > 0$)
- Klasifikasi II : unggulan jika sektor basis ($LQ \geq 1$) dan tumbuh lambat ($Dij < 0$)
- Klasifikasi III : prospektif jika bukan sektor basis ($LQ < 1$) dan tumbuh cepat ($Dij > 0$)
- Klasifikasi IV : tertinggal jika bukan sektor basis ($LQ < 1$) dan tumbuh lambat ($Dij < 0$)

BAB IV. GAMBARAN UMUM PARIWISATA

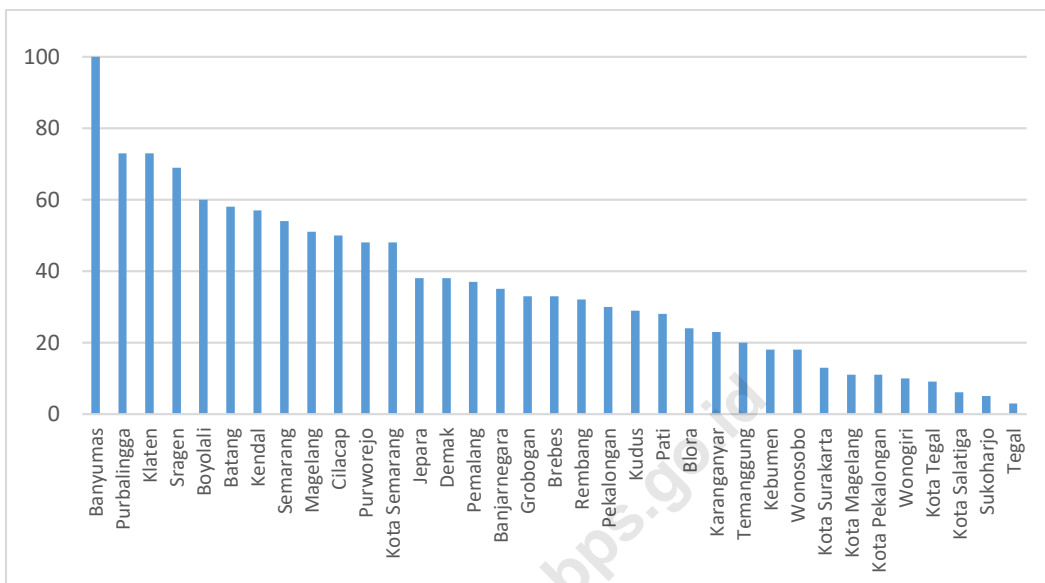
4.1. Daya Tarik Wisata Jawa Tengah

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan bahwa Daya Tarik Wisata bisa dijelaskan sebagai segala sesuatu yang mempunyai keunikan, kemudahan, dan nilai yang berwujud keanekaragaman, kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan para wisatawan. Sedangkan dalam undang-undang nomor 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan disebutkan bahwa Daya Tarik Wisata adalah suatu yang menjadi sasaran wisata, yang terdiri dari beberapa hal, yaitu :

- Daya Tarik Wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang terdiri dari keadaan alam, flora dan fauna;
- Daya Tarik Wisata hasil karya manusia yang terdiri dari museum, peninggalan sejarah, seni dan budaya, wisata agro, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi, dan kompleks hiburan; dan
- Daya Tarik Wisata minat khusus, merupakan suatu hal yang menjadi daya tarik sesuai dengan minat dari wisatawannya seperti berburu, mendaki gunung, menyusuri gua, industri dan kerajinan, tempat perbelanjaan, sungai air deras, tempat-tempat ibadah, tempat ziarah dan lain-lainnya.

Menurut Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, jumlah Daya Tarik Wisata di tiap kabupaten/kota sangat bervariasi. Sampai tahun 2022 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan jumlah Daya Tarik Wisata terbanyak adalah Banyumas sebanyak 100 lokasi disusul Purbalingga dan Klaten sebanyak 73 lokasi. Sedangkan kabupaten/kota dengan jumlah Daya Tarik Wisata paling sedikit adalah Kabupaten Tegal sebanyak 3 lokasi, Sukoharjo sebanyak 5 lokasi dan Kota Salatiga sebanyak 6 lokasi.

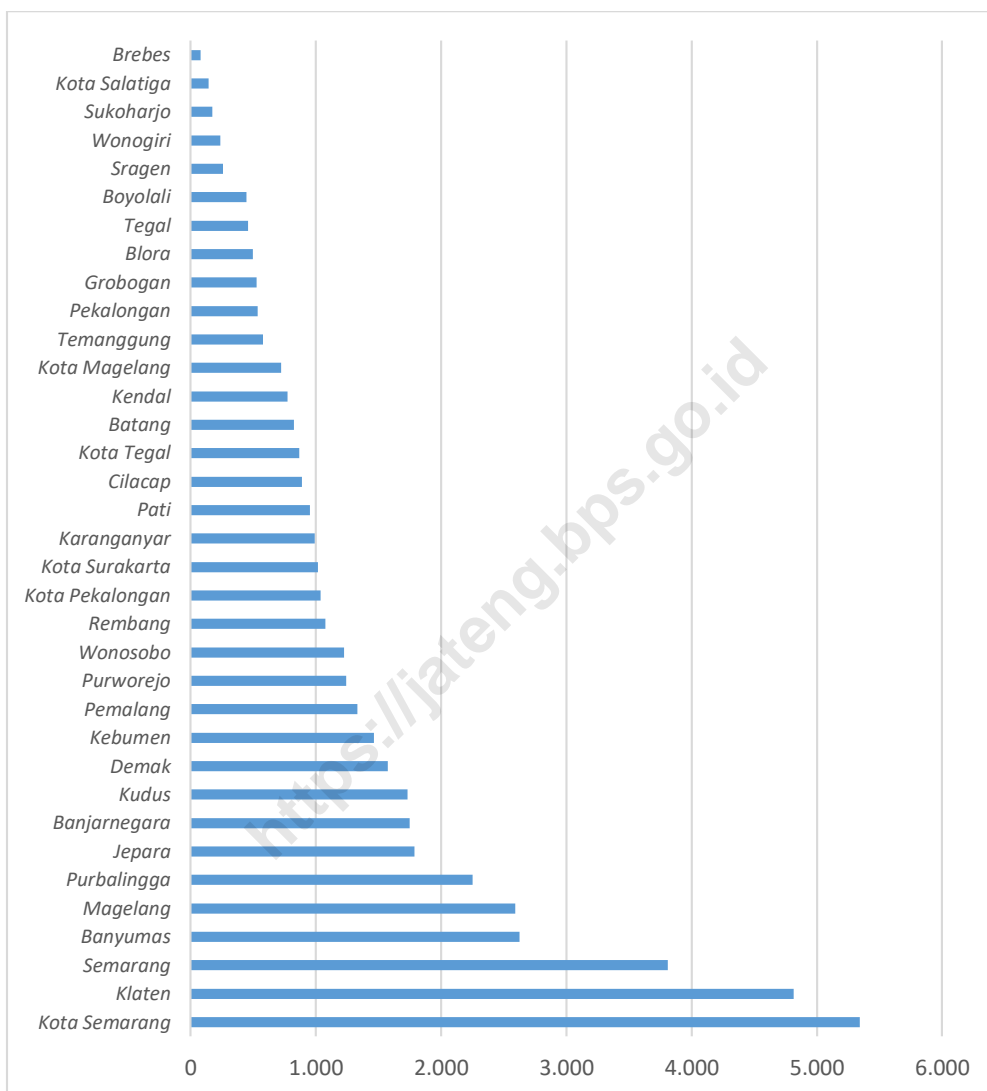
Gambar 3.1. Sebaran Daya Tarik Wisata di Provinsi Jawa Tengah 2022



Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah

Meskipun jumlah Daya Tarik Wisata Kota Semarang berada di urutan kedua belas, namun berdasarkan data Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah ternyata memiliki jumlah pengunjung paling banyak selama tahun 2022. Jumlah pengunjung Daya Tarik Wisata dan Event di Kota Semarang selama tahun 2022 tercatat sebanyak 5,34 juta pengunjung. Pengunjung Daya Tarik Wisata dan Event terbanyak di urutan berikutnya adalah Klaten sebanyak 4,82 juta pengunjung dan Kabupaten Semarang sebanyak 3,81 juta pengunjung. Meskipun Kabupaten Semarang hanya berada peringkat sembilan dengan jumlah Daya Tarik Wisata 51 lokasi, namun jumlah pengunjung ke Daya Tarik Wisata di Kabupaten tersebut menempati peringkat ketiga. Sebaliknya Kabupaten Purbalingga yang menempati peringkat kedua terkait jumlah Daya Tarik Wisatanya, justru jumlah pengunjung yang hadir ke kabupaten tersebut hanya berada pada peringkat enam dengan jumlah pengunjung sebanyak 2,25 juta pengunjung.

Gambar 3.2. Sebaran Pengunjung Daya Tarik Wisata dan Event di Provinsi Jawa Tengah 2022

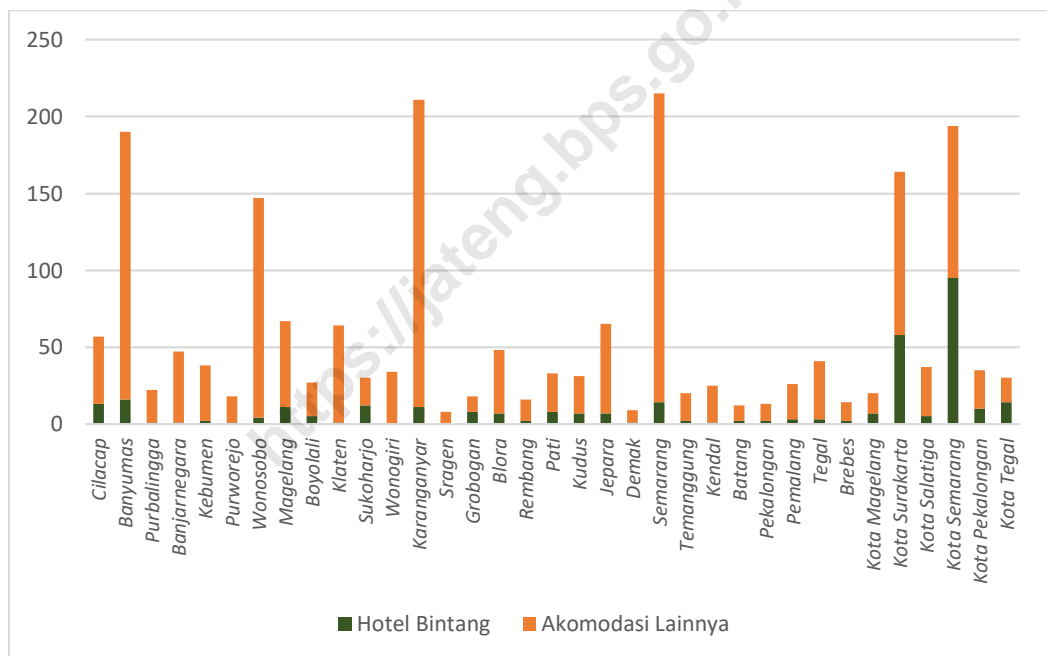


Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah

Jasa akomodasi dan perhotelan tidak dapat dipisahkan dari pariwisata. Kegiatan kepariwisataan harus ditunjang akomodasi perhotelan yang bagus. Akomodasi sejalan dengan mata rantai kegiatan wisata di daerah. Wisatawan akan memerlukan tempat tinggal untuk sementara selama dalam perjalanan agar dapat beristirahat dengan menyenangkan. Adanya sarana akomodasi, maka akan

mendorong wisatawan untuk berkunjung dan menikmati objek dan daya tarik wisata di daerah dengan waktu yang relatif lebih lama. Informasi mengenai akomodasi akan mempengaruhi penilaian wisatawan tentang pilihan jenis akomodasi, baik jenis fasilitas dan pelayanan yang diberikan, tingkat harga, jumlah kamar yang tersedia, maupun pemandangan alam yang disajikan oleh pihak hotel. Pemandangan alam yang menjadi view hotel dapat berupa sungai, pantai, puncak, gunung.

Gambar 3.3. Sebaran Hotel dan Jasa Akomodasi Lainnya di Provinsi Jawa Tengah 2022

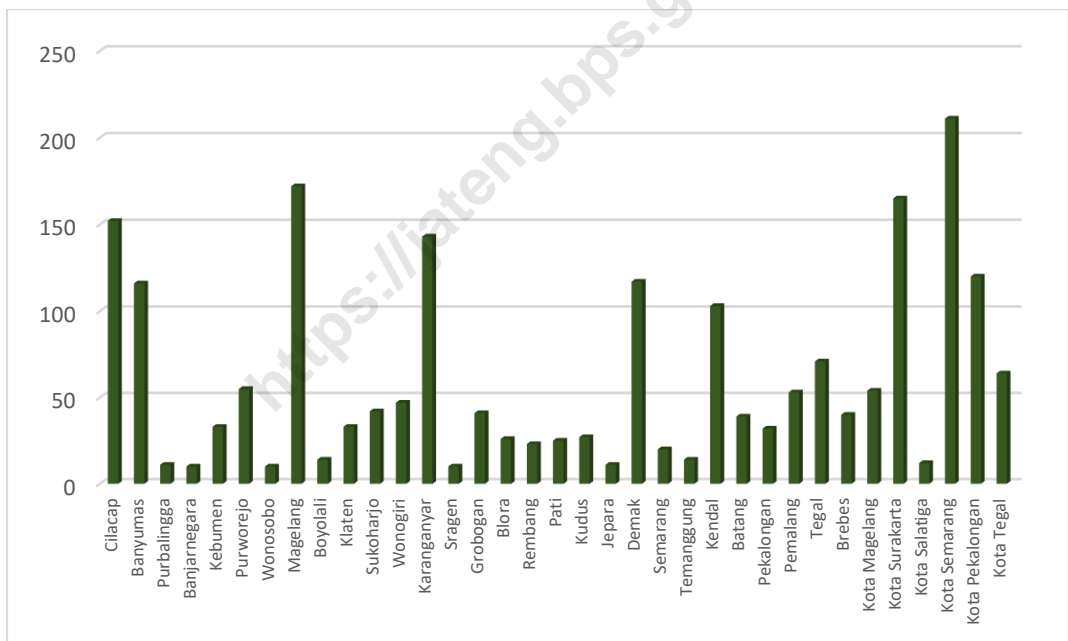


Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Akomodasi perhotelan sebagai sarana pariwisata dapat menjadi ujung tombak wisata kepariwisataan. Usaha yang dilakukan secara langsung dengan memberikan pelayanan kepada wisatawan pada suatu daerah tujuan wisata. Keberadaannya bergantung kepada wisatawan agar tertarik dengan adanya kegiatan perjalanan wisata (mmc.kalteng.go.id:2018). Seperti halnya Daya Tarik

Wisata, hotel dan akomodasi lainnya juga menyebar secara tidak merata di kabupaten/kota se Jawa Tengah. Berdasarkan Survei VHT-L yang dilaksanakan BPS Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022, jumlah hotel berbintang dan akomodasi paling banyak dimiliki Kabupaten Semarang sebanyak 223 buah yang terdiri dari 14 buah hotel berbintang dan 209 buah akomodasi lainnya. Disusul Kabupaten Karanganyar sebanyak 207 buah dengan 12 buah hotel bintang dan 195 buah akomodasi lainnya, berikutnya adalah Kota Semarang sebanyak 197 buah yang terdiri dari 94 buah hotel berbintang dan 103 buah akomodasi lainnya.

Gambar 3.4. Sebaran Restoran/Rumah Makan di Provinsi Jawa Tengah 2021



Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah

Dalam industri pariwisata, hotel bukan satu-satunya bentuk akomodasi bagi wisatawan. Hotel dan restoran merupakan salah satu faktor penunjang utama kegiatan pariwisata. Wisatawan yang berkunjung ke suatu objek wisata tentu ingin menikmati perjalanan wisatanya, sehingga pelayanan makanan dan minuman harus mendukung. Apabila suatu daerah tujuan wisata mempunyai makanan yang khas,

wisatawan yang datang selain menikmati atraksi wisata. Hal yang harus diperhatikan dalam penyediaan fasilitas makanan dan minuman berupa jenis dan variasi makanan yang ditawarkan, tingkat kualitas makanan dan minuman yang diberikan, tingkat harga, tingkat higienis.

Dari data Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah ternyata restoran/rumah makan di Jawa Tengah tersebar secara tidak merata di kabupaten/kota. Jumlah restoran/rumah makan terbanyak ada 211 buah yang dimiliki oleh Kota Semarang, disusul Kabupaten Magelang sebanyak 172 buah dan Kota Surakarta sebanyak 165 buah. Meskipun beberapa kabupaten/kota memiliki jumlah restoran/rumah makan lebih dari seratus, namun masih ada kabupaten/kota yang memiliki restoran/rumah makan hanya 10 buah, seperti Banjarnegara, Wonosobo dan Sragen.

4.2. Potensi Ekonomi Pariwisata Jawa Tengah

Pembangunan kepariwisataan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha, mendorong pemerataan pembangunan nasional, dan memberikan kontribusi dalam penerimaan devisa negara yang dihasilkan dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), serta berperan dalam mengentaskan kemiskinan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Peranan sektor pariwisata terhadap perekonomian dapat berupa menciptakan atau menambah lapangan dan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar di lingkungan dimana industri itu berdiri seperti dalam usaha akomodasi, restoran, pemandu wisata, seniman, biro perjalanan dan jasa lainnya. Industri pariwisata juga memberikan kontribusi langsung terhadap sektor lain berupa usaha – usaha pembuatan atau perbaikan jalan raya, pelabuhan, bandara, program kebersihan dan kesehatan yang kesemuanya dapat memberikan keuntungan dan

kesenangan baik bagi masyarakat dalam lingkungan wilayah yang bersangkutan maupun bagi wisatawan. Sektor pariwisata memacu dan memberi kontribusi kepada pelaksanaan proyek – proyek pada berbagai sektor di negara – negara berkembang dan maju (Pendit, 1994).

Pembangunan kepariwisataan menurut UU No. 9 Tahun 2010 tentang Kepariwisataan bertujuan untuk: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi; Meningkatkan kesejahteraan rakyat; Menghapus kemiskinan; Mengatasi pengangguran; Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; Memajukan kebudayaan; Mengangkat citra bangsa; Memupuk rasa cinta tanah air; Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan Mempererat persahabatan antarbangsa. Pembangunan kepariwisataan Indonesia meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan.

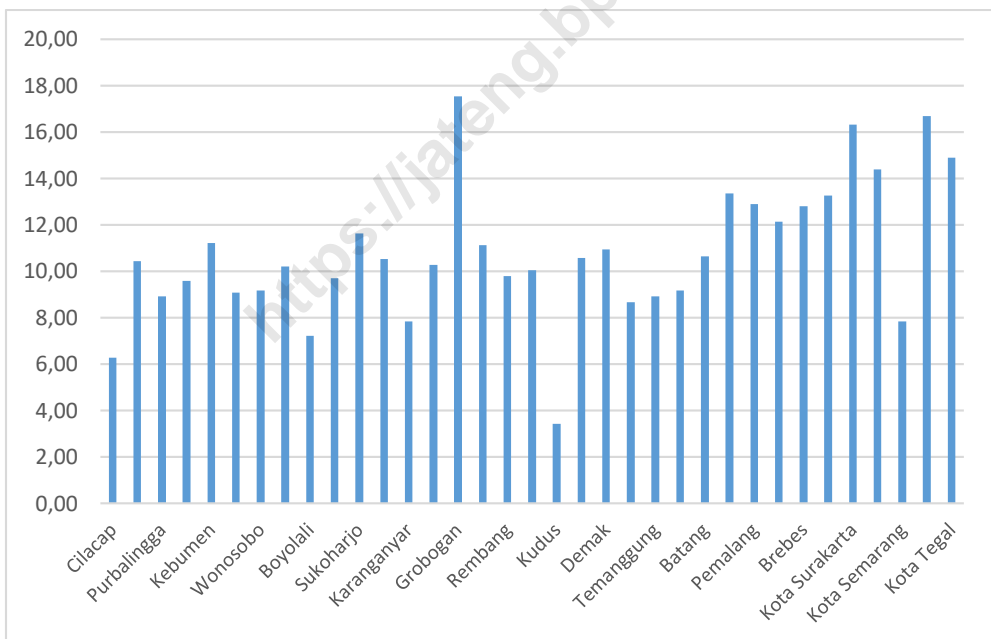
Dalam Renstra Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah 2018-2023, upaya dilakukan untuk terus meningkatkan sektor pariwisata, antara lain program pengembangan destinasi pariwisata, program pengembangan pariwisata dan program pengembangan SDM pariwisata dan Ekraf. Program pengembangan destinasi dilakukan antara lain dengan kegiatan pengembangan kawasan pariwisata, daya tarik wisata dan industri pariwisata. Sedangkan program pengembangan pariwisata antara lain pengembangan pasar wisata, promosi dan informasi pariwisata serta pencitraan pariwisata Jawa Tengah.

Berbagai upaya yang tertuang dalam renstra tersebut, mampu meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Jawa Tengah dari 7,91 persen pada tahun 2012 menjadi 8,41 persen pada tahun 2022. Pada tahun 2020 kontribusi sektor pariwisata mengalami penurunan menjadi 7,8 persen akibat berbagai kebijakan pembatasan di sektor pariwisata untuk mengantisipasi lonjakan pandemi covid-19. Dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian Jawa Tengah, pada tahun 2021 kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Jawa

Tengah sedikit meningkat menjadi 7,85 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan terus meningkat pada tahun 2022 menjadi 8,41 persen.

Sementara itu pada level kabupaten/kota di Jawa Tengah, pada tahun 2022 kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian masing-masing kabupaten/kota berkisar antara 3 persen hingga 18 persen. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Grobogan merupakan yang tertinggi, yaitu sebesar 17,54 persen, disusul Kota Pekalongan sebesar 16,68 persen dan Kota Surakarta sebesar 16,33 persen. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB paling rendah dimiliki Kudus sebesar 3,41 persen.

Gambar 3.5. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2022

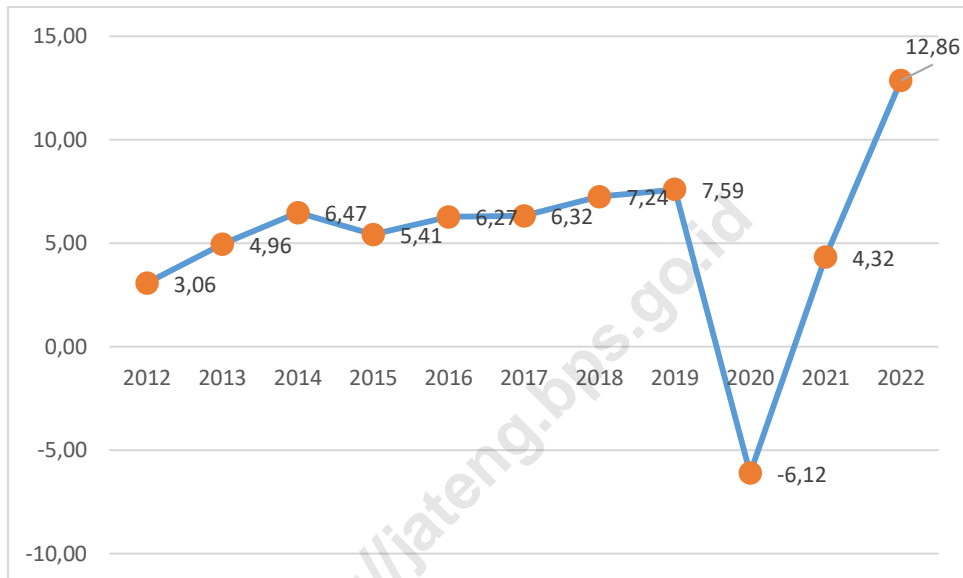


Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah diolah, (dihitung berdasarkan IRTS)

Namun jika dilihat kontribusinya terhadap sektor pariwisata provinsi, Kota Semarang memiliki kontribusi tertinggi yaitu 11,71 persen, sedangkan kabupaten/kota lain kontribusinya masih di bawah sepuluh persen yaitu berkisar

antara 0,5 persen hingga 6 persen. Hal ini mengindikasikan potensi pariwisata di Kabupaten/Kota masih belum digali secara optimal, sehingga kontribusinya terhadap pariwisata provinsi Jawa Tengah cenderung masih kecil.

Gambar 3.6. Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata Jawa Tengah, 2012-2022



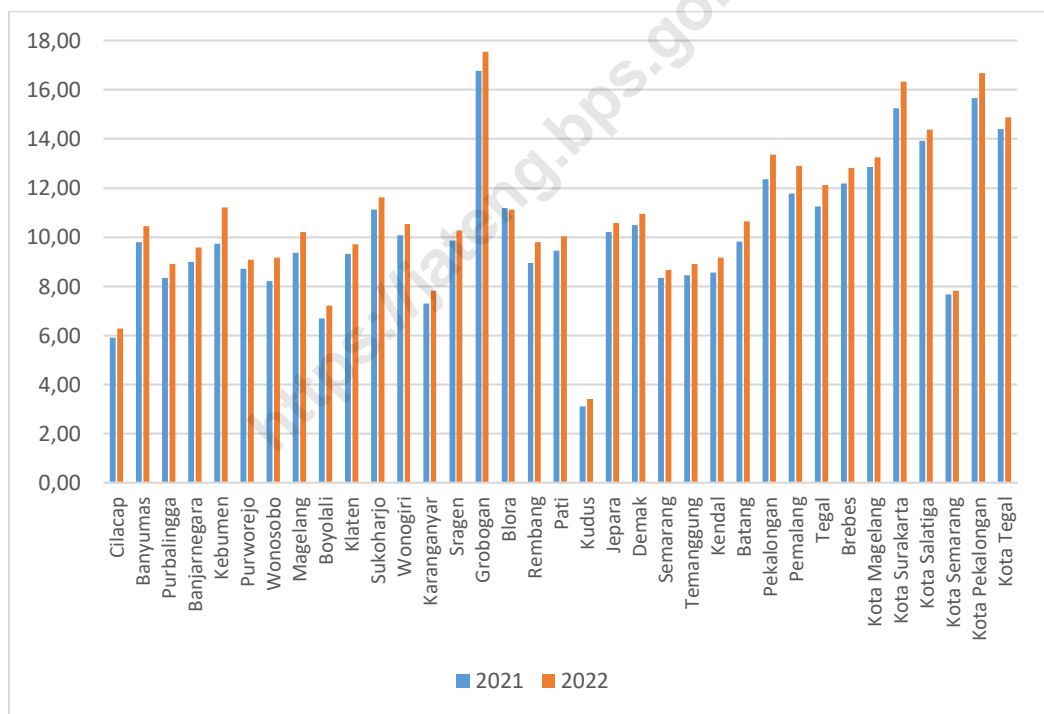
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah diolah, (dihitung berdasarkan IRTS)

Pada periode 2012 hingga 2015, pertumbuhan sektor pariwisata terlihat mengalami fluktuasi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya menggali potensi pariwisata Jawa Tengah. Berbagai upaya dilakukan untuk terus meningkatkan sektor ini, antara lain program pengembangan destinasi pariwisata, program pengembangan pariwisata dan program pengembangan SDM pariwisata dan Ekraf. Upaya tersebut mendorong kenaikan pertumbuhan PDRB sektor pariwisata, dari 6,27 persen tahun 2016 menjadi 7,59 persen pada tahun 2019. Terjadinya pandemi covid-19 telah menyebabkan terpuruknya sektor pariwisata Jawa Tengah hingga mengalami kontraksi sebesar -6,12 persen. Meskipun perekonomian Jawa Tengah belum sepenuhnya pulih namun sektor pariwisata telah mampu tumbuh 4,32 persen walaupun masih lebih lambat jika dibandingkan tahun-

tahun sebelum terjadinya pandemi covid-19. Dan kembali meningkat hingga 12,86 persen pada tahun 2022.

Semakin pulihnya perekonomian di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dari pandemi covid-19 pada tahun 2020, menyebabkan pariwisata di seluruh juga mulai bangkit. Hal ini terlihat dari pertumbuhan sektor pariwisata di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah memperlihatkan kenaikan disbanding tahun sebelumnya.

Gambar 3.7. Pertumbuhan Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2021-2022



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah diolah, (dihitung berdasarkan IRTS)

BAB V. KETIMPANGAN PEMBANGUNAN PARIWISATA

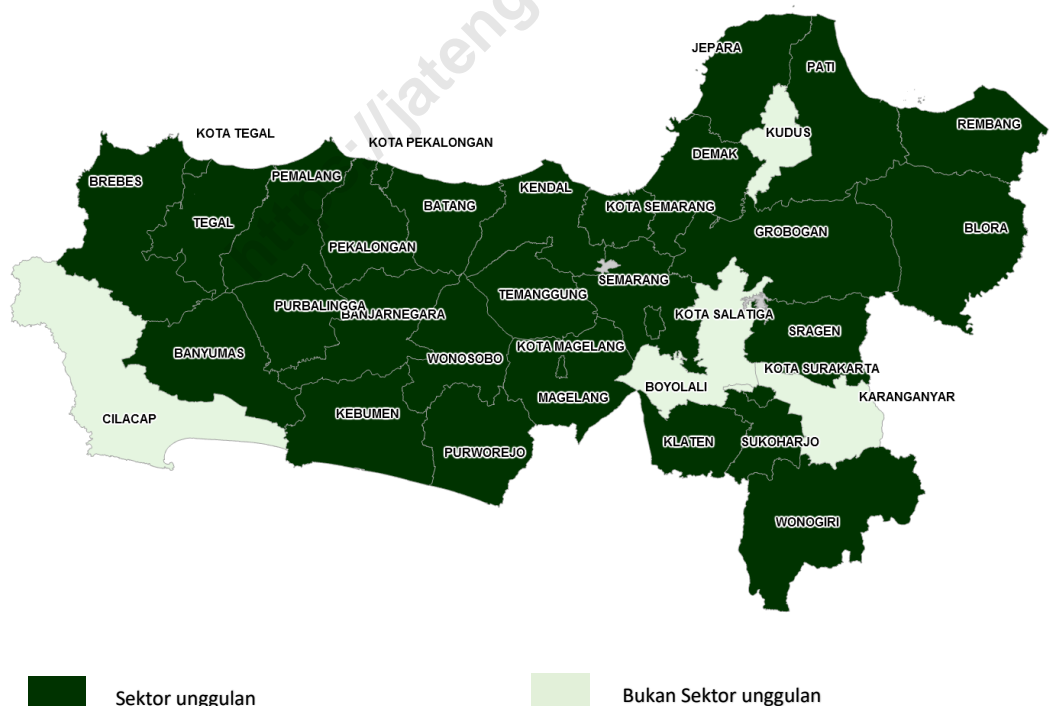
5.1. *Location Quotient* (LQ)

Untuk mengidentifikasi wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang memiliki sektor pariwisata sebagai sektor unggulan atau sektor ekonomi basis akan digunakan alat analisis *Location Quotient* (LQ). Metode LQ telah dipergunakan secara luas untuk mengidentifikasi peran spesialisasi suatu sektor. Analisis *Location Quotient* (LQ) digunakan untuk mengidentifikasi keunggulan komparatif kabupaten/kota di Jawa Tengah terhadap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Teori *Location Quotient* digunakan untuk menganalisis keragaman unggulan ekonomi. Dari analisis tersebut dapat diidentifikasi sektor pariwisata yang dapat dikembangkan untuk tujuan sektor dan tujuan memenuhi kebutuhan lokal di wilayah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, sehingga sektor pariwisata tersebut dikatakan potensial dapat dijadikan sektor prioritas utama dalam perencanaan pembangunan ekonomi.

Sektor pariwisata dikatakan unggulan apabila memperoleh nilai $LQ > 1$, hal ini menyiratkan bahwa tingkat spesialisasi dalam sektor pariwisata dari masing-masing kabupaten/kota tersebut lebih besar apabila dibandingkan dengan sektor pariwisata di tingkat provinsi. Dengan kata lain jika $LQ > 1$, mempunyai arti bahwa sektor pariwisata merupakan sektor terkemuka di kabupaten/kota tersebut dan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pendorong ekonomi lokal. Tetapi apabila suatu kabupaten/kota memperoleh nilai $LQ < 1$, ini berarti bahwa tingkat spesialisasi dalam sektor pariwisata dari kabupaten tersebut kurang dari sektor pariwisata di tingkat provinsi. Oleh karena itu, sektor pariwisata bukan sektor yang dominan dan kurang potensial untuk dikembangkan sebagai pendorong ekonomi lokal, dan apabila nilai $LQ = 1$, ini menyiratkan bahwa tingkat spesialisasi dalam sektor pariwisata di suatu kabupaten/kota sama dengan di tingkat provinsi, peran sektor pariwisata di kabupaten/kota tersebut relatif sama dengan peran sektor pariwisata di tingkat provinsi.

Dilihat dari rata-rata nilai LQ 2012 hingga 2022, hampir seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah mempunyai sektor unggulan di sektor pariwisata kecuali Kabupaten Cilacap, Boyolali, Karanganyar dan Kudus. Dengan kata lain, pariwisata di empat kabupaten tersebut bukan menjadi sektor basis atau memiliki potensi yang lebih kecil dibandingkan daerah lain untuk semakin dikembangkan. Jika dilihat dari potensi wisata yang dimiliki oleh keempat kabupaten tersebut tidak sebanyak kabupaten/kota lain di Jawa Tengah baik dari jumlah daya Tarik wisata, jumlah hotel dan jasa akomodasi lainnya maupun jumlah restoran/rumah makan. Sedangkan kontribusi sektor pariwisata dari keempat kabupaten tersebut terhadap sektor pariwisata Jawa Tengah juga relatif masih kecil.

Gambar 5.1. Sebaran Sektor Unggulan Pariwisata Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2022



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, data diolah

Namun, penentuan sektor basis dengan menggunakan LQ memiliki kelemahan yaitu bersifat statis. Artinya sektor yang menjadi basis pada tahun tertentu belum tentu menjadi unggulan di masa yang akan datang dan sebaliknya sektor yang tidak menjadi basis bisa menjadi basis. Untuk mengatasi kelemahan LQ, maka digunakan analisis varians dari LQ, yaitu *Dynamic Location Quotien* (DLQ) yang berguna untuk melihat reposisi sektoral (perubahan posisi sektor).

5.2. Pemetaan Wilayah menurut Kategori LQ

Formula LQ yang digunakan di atas bersifat statis atau *Static Location Quotients* (SLQ) karena hanya melihat satu periode atau titik waktu saja. Model ini lemah karena tidak mampu melihat perubahan spesialisasi secara periodik. Model tidak dapat melihat apakah suatu sektor yang unggul pada tahun $t-n$ masih tetap menjadi sektor unggulan pada tahun t . Demikian pula, model tidak mengakomodasi jika sektor yang belum unggul pada saat ini akan menjadi sektor unggulan di masa yang akan datang. Pada pemetaan wilayah menurut kategori LQ, nilai SLQ yang dipergunakan adalah rata-rata SLQ dari setiap SLQ yang dihasilkan pada 2011-2021. Selain itu untuk menggunakan LQ dalam pengambilan keputusan ekonomi regional adalah dengan melihat bagaimana nilai LQ berubah sepanjang tahun (dinamis). Nilai dari perubahan LQ ini menyediakan informasi yang bernilai apakah suatu sektor ekonomi suatu daerah meningkat atau turun konsentrasinya secara relatif terhadap daerah lain. Hasil indeks LQ dalam analisis dapat dipergunakan sebagai cerminan potensi lebih dari suatu daerah secara relatif terhadap daerah lainnya.

Pada gambar 5.2 memperlihatkan sektor pariwisata dilihat dari potensi dan kemampuan bersaing antara kabupaten/kota antara Jawa Tengah, sebagai berikut :

- A. Daerah dengan klasifikasi sektor pariwisata mampu bersaing dan sekaligus potensial ($SLQ > 1$ dan $\Delta LQ > 0$)

Tipe daerah yang memiliki kemampuan bersaing dalam sektor pariwisata sekaligus memiliki potensi tinggi dalam pengembangannya merupakan daerah yang dapat dikategorikan daerah pariwisata yang maju dan potensial, sehingga dapat dijadikan daerah percontohan sektor pariwisata. Daerah dengan klasifikasi sektor pariwisata mampu bersaing dan sekaligus potensial antara lain : Wonosobo, Magelang, Wonogiri, Grobogan, Pati, Temanggung, Kendal dan Kota Pekalongan. Majunya sektor pariwisata wilayah dalam kategori ini dapat diperkirakan karena struktur perekonomiannya yang mendukung proses pariwisata daerah.

- B. Daerah dengan klasifikasi sektor pariwisata yang mampu bersaing tetapi tidak potensial ($SLQ > 1$ dan $\Delta LQ < 0$)

Wilayah dengan nilai SLQ tinggi menunjukkan daerah tersebut masih memiliki keunggulan relatif pada sektor pariwisata daripada daerah lain. Hasil analisis LQ menunjukkan terdapat beberapa daerah di Jawa Tengah yang memerlukan perhatian lebih khusus karena terjadi penurunan LQ. Kondisi ini mencerminkan menurunnya potensi relatif daerah pada sektor pariwisata. Sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Tengah tergolong klasifikasi daerah dengan pariwisata yang maju, tetapi menurun potensinya, meliputi Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Klaten, Sukoharjo, Sragen, Blora, Rembang, Jepara, Demak, Semarang, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang dan Kota Tegal.

- C. Daerah dengan klasifikasi sektor pariwisata potensial tetapi kurang mampu bersaing ($SLQ < 1$ dan $\Delta LQ > 0$)

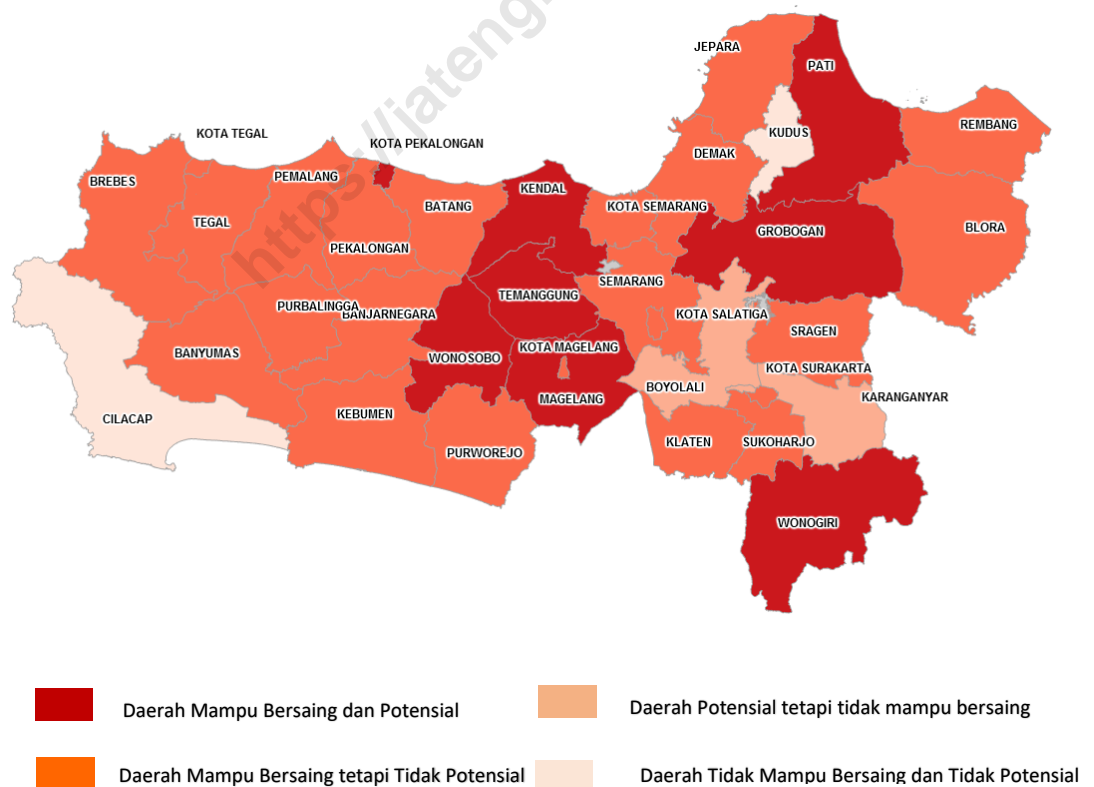
Dari observasi terhadap 35 daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah, hasil analisis LQ mengidentifikasi wilayah dengan kategori

pariwisata yang kurang mampu bersaing, tetapi memiliki potensi pengembangan yang tinggi. Wilayah ini meliputi Cilacap dan Kudus. Kedua wilayah ini dapat menjadi pendorong majunya sektor pariwisata di wilayah Jawa Tengah.

- D. Daerah dengan klasifikasi sektor pariwisata yang kurang mampu bersaing dan tidak potensial ($SLQ < 1$ dan $\Delta LQ < 0$)

Daerah dengan kategori memiliki tingkat persaingan pariwisata yang rendah sekaligus tidak potensial di Jawa Tengah meliputi Boyolali dan Karanganyar.

Gambar 5.2. Sebaran wilayah menurut Diagram Pemetaan Wilayah Kategori LQ Sektor Pariwisata Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Tahun 2012-2022



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, data diolah

5.3. Analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ)

Analisis untuk mengetahui terjadinya suatu perubahan posisi terhadap sektor pariwisata kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dilakukan melalui metode *Dynamic Location Quotient* (DLQ). Pada dasarnya penafsiran metode DLQ dengan LQ adalah sama, hanya saja metode *Location Quotient* mempunyai kelemahan yaitu analisisnya yang bersifat statis sehingga tidak dapat menangkap kemungkinan perubahan-perubahan yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Karena sektor basis pada saat ini belum tentu akan menjadi sektor basis pada masa yang akan datang dan sebaliknya juga sektor non basis pada saat ini mungkin saja akan berubah menjadi sektor basis pada selanjutnya. Pada metode DLQ lebih menekankan pada proporsi laju pertumbuhan sektor pariwisata (PDRB) kabupaten/kota dibandingkan sektor pariwisata Jawa Tengah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah kedepannya sektor pariwisata akan tetap akan menjadi basis atau terjadi reposisi menjadi non basis.

Hasil analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ) menunjukkan bahwa sektor pariwisata hampir seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah tidak mengalami perubahan posisi karena memiliki nilai $DLQ > 1$ sehingga kedepan sektor pariwisata masih tetap menjadi sektor basis yang dapat diunggulkan dan mempunyai daya saing yang tinggi dibandingkan sektor pariwisata terhadap Jawa Tengah. Hanya Sembilan kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan nilai $DLQ \leq 1$ sehingga sektor pariwisata di kabupaten/kota tersebut tidak dapat diharapkan untuk menjadi sektor basis pada masa yang akan datang. Kesembilan kabupaten/kota tersebut adalah Cilacap, Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Wonogiri, Grobogan, Pati, Kudus dan Temanggung.

Gambar 5.3. Sebaran wilayah menurut Dynamic Location Quotient (DLQ)

Sektor Pariwisata Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Tahun 2012-2022



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, data diolah

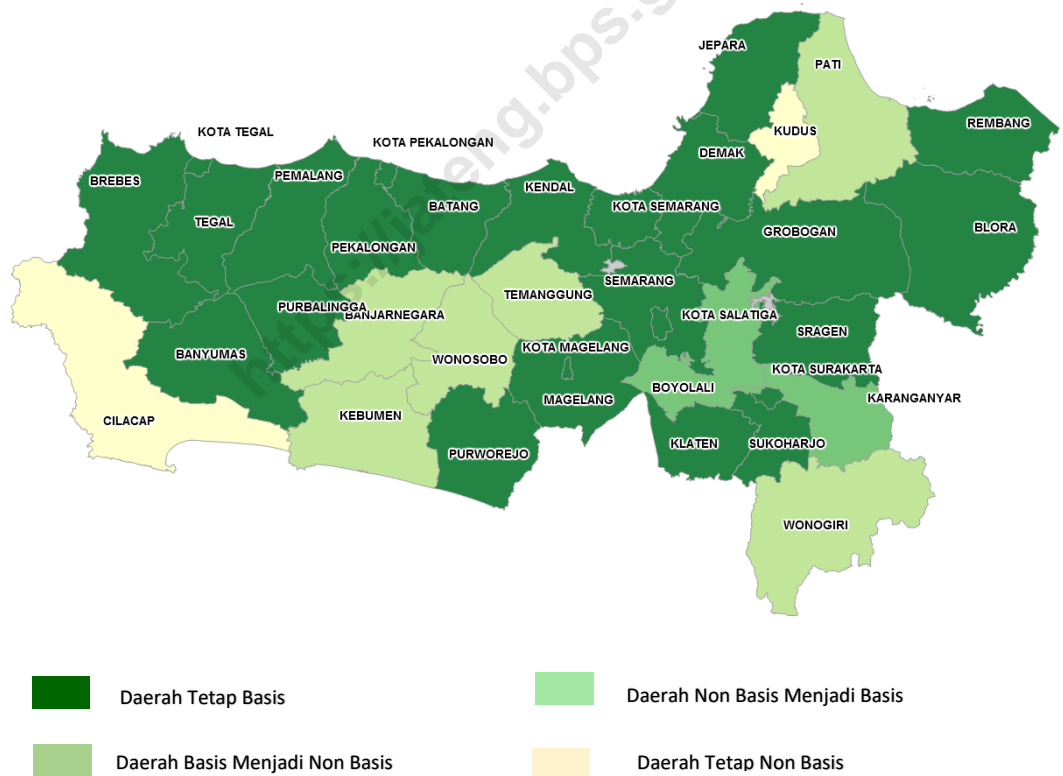
5.4. Analisis Gabungan Location Quotient (LQ) Dan Dynamic Location Quotient (DLQ)

Untuk mengetahui perubahan posisi dari setiap sektor perekonomian maupun sektor pertanian dapat dilakukan dengan cara menggabungkan dua metode analisis sebelumnya yaitu metode *Location Quotient* (LQ) dan *Dynamic Location Quotient* (DLQ).

Hasil analisis gabungan *Location Quotient* (LQ) dan *Dynamic Location Quotient* (DLQ) ada dua kabupaten di Jawa Tengah yang sektor pariwisatanya tetap menjadi non basis yaitu Cilacap dan Kudus. Ada enam kabupaten/kota yang mengalami perubahan posisi sektor pariwisata dari basis menjadi non basis yaitu Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Wonogiri, Pati dan Temanggung. Ini harus

menjadi perhatian khusus bagi pemerintah agar kedepannya dapat terus menjadikan sektor pariwisata menjadi sektor basis yang dapat diandalkan di masa yang akan datang. Dan ada dua kabupaten yang berubah posisi sektor pariwisatanya dari non basis menjadi basis yaitu Boyolali dan Karanganyar. Sebagaimana besar kabupaten/kota di Jawa Tengah sektor pariwisatanya tidak mengalami perubahan dan tetap menjadi sektor basis.

Gambar 5.4. Sebaran wilayah menurut Analisis Gabungan Location Quotient (LQ) Dan Dynamic Location Quotient (DLQ) Sektor Pariwisata Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Tahun 2012-2022



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, data diolah

5.5. Analisis Shift Share

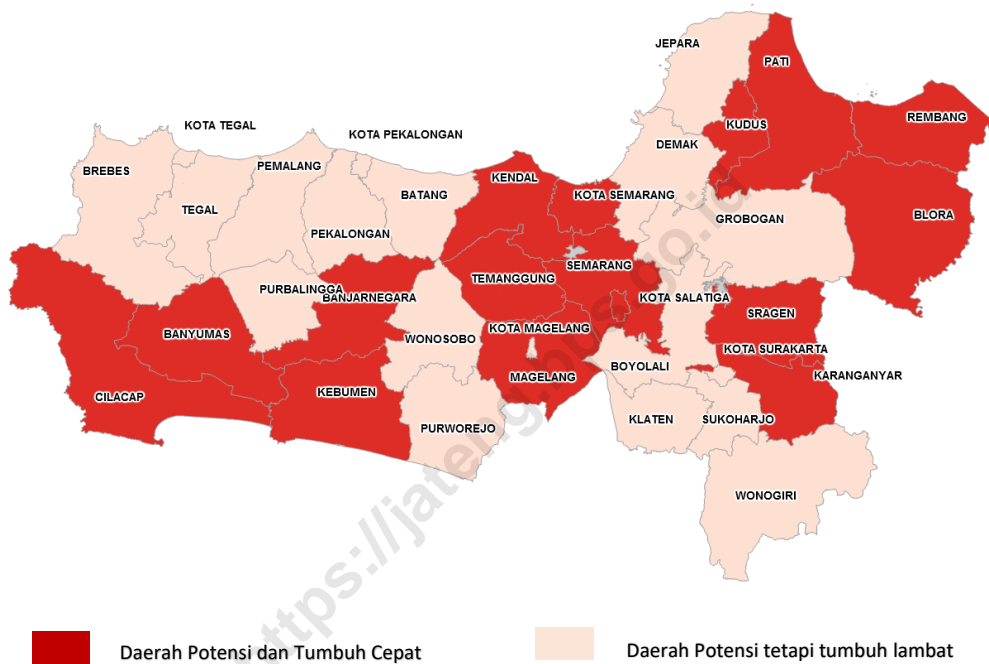
Analisis shift share adalah salah satu teknik kuantitatif yang biasa digunakan untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah relatif terhadap struktur ekonomi wilayah administratif yang lebih tinggi sebagai pembanding atau referensi. Untuk tujuan tersebut, analisis ini menggunakan 3 informasi dasar yang berhubungan satu sama lain yaitu pertama, pertumbuhan ekonomi referensi kabupaten/kota atau provinsi (*province growth effect -Nij*), yang menunjukkan bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi propinsi terhadap perekonomian daerah. Kedua, pergeseran proporsional (*proporsional shift -Pij*) yang menunjukkan perubahan relatif kinerja suatu sektor di daerah tertentu terhadap sektor yang sama di referensi kabupaten/kota atau provinsi. Pergeseran proporsional (*proportional shift*) disebut juga pengaruh sektor pariwisata. Pengukuran ini memungkinkan kita untuk mengetahui apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada sektor pariwisata yang tumbuh lebih cepat ketimbang sektor pariwisata pada wilayah yang dijadikan referensi. Ketiga, pergeseran diferensial (*differential shift -Dij*) yang memberikan informasi dalam menentukan seberapa jauh daya saing sektor pariwisata daerah (lokal) dengan perekonomian yang dijadikan referensi. Jika pergeseran diferensial dari suatu sektor pariwisata adalah positif, maka sektor pariwisata tersebut relatif lebih tinggi daya saingnya dibandingkan sektor pariwisata yang sama pada perekonomian yang dijadikan referensi. Pergeseran diferensial disebut juga pengaruh keunggulan kompetitif.

Bila dirinci menurut kabupaten/kota, nilai shift share PDRB sektor pariwisata atas dasar harga konstan kabupaten/kota periode tahun 2012 sampai 2022 menunjukkan sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Tengah memiliki nilai pergeseran bersih positif yang berarti pertumbuhan sektor pariwisata kabupaten/kota tersebut termasuk dalam kelompok yang progresif (maju). Hanya ada lima kabupaten/kota di Jawa Tengah yang memiliki nilai PB negatif, yaitu

Boyolali. Klaten, Pekalongan, Kota Magelang dan Kota Pekalongan yang termasuk kelompok dengan pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata lambat.

Gambar 5.5. Sebaran wilayah menurut Analisis Shift Share

Sektor Pariwisata Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Tahun 2012-2022



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, data diolah

Bila dilihat besaran Pij dan Dij, maka kabupaten/kota di Jawa Tengah hanya dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu:

1. Di kuadran I (Pij positif dan Dij positif), ada enam belas kabupaten/kota di Jawa Tengah memiliki pertumbuhan sektor pariwisata yang cepat dan memiliki daya saing yaitu Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, Magelang, Karanganyar, Sragen, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Semarang, Temanggung, Kendal, Kota Salatiga dan Kota Semarang.
2. Di kuadran IV (Pij positif dan Dij negatif), yaitu kabupaten/kota yang memiliki potensi tetapi tertekan atau memiliki daya saing tinggi tetapi

pertumbuhan ekonomi sektor pariwisatanya lambat yaitu Purbalingga, Purworejo, Wonosobo, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Grobogan, Jepara, Demak, Batang, Pemalang, Pekalongan, Tegal, Brebes, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Pekalongan dan Kota Tegal. Kesembilan belas kabupaten/kota tersebut merupakan sektor/wilayah dengan kecepatan pertumbuhan terhambat namun cenderung berpotensi.

Seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah memiliki daya saing atau potensi sektor pariwisata yang tinggi, hanya terdapat perbedaan dalam kecepatan pertumbuhan sektor pariwisata.

5.6. Analisis Overlay

Berdasarkan gabungan analisis LQ dan Shift Share dapat disusun analisis overlay untuk menentukan mendeskripsikan klasifikasi dan tipologi daerah. Klasifikasi daerah berdasarkan sektor basis dan non basis dengan pertumbuhan cepat atau lambat, dengan menggabungkan LQ dengan *Differential Shift* (Dij) akan diperoleh:

1. Klasifikasi I : sektor basis ($LQ \geq 1$) dan tumbuh cepat ($Dij > 0$)
2. Klasifikasi II : sektor basis ($LQ \geq 1$) dan tumbuh lambat ($Dij < 0$)
3. Klasifikasi III : bukan sektor basis ($LQ < 1$) dan tumbuh cepat ($Dij > 0$)
4. Klasifikasi IV : bukan sektor basis ($LQ < 1$) dan tumbuh lambat ($Dij < 0$)

Berdasarkan klasifikasi di atas nampak bahwa tiga belas kabupaten/kota di klasifikasi I, artinya sektor pariwisata pada wilayah tersebut merupakan sektor basis/unggulan dan memiliki keunggulan kompetitif/pertumbuhan cepat, yaitu Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, Magelang, Sragen, Blora, Rembang, Pati, Semarang, Temanggung, Kendal, Kota Salatiga dan Kota Semarang.

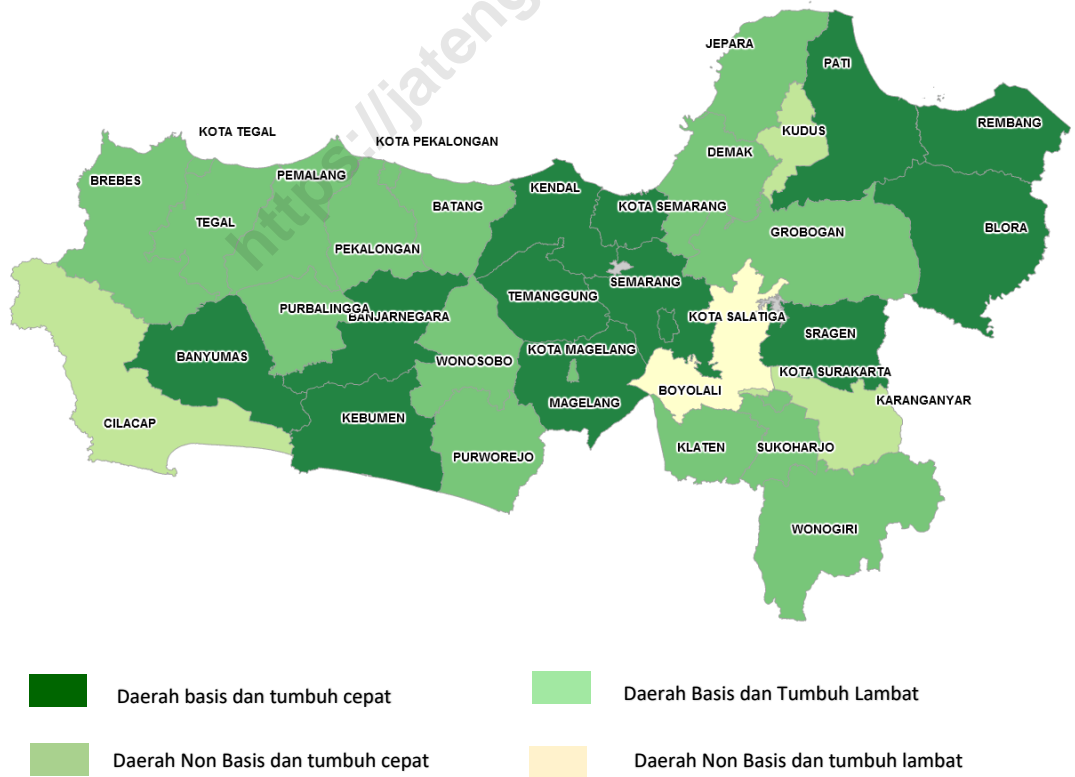
Kemudian yang termasuk klasifikasi II adalah Purbalingga, Purworejo, Wonosobo, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Grobogan, Jepara, Demak, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota

Pekalongan dan Kota Tegal merupakan kabupaten/kota dengan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan namun tidak memiliki keunggulan kompetitif/pertumbuhan lambat.

Kabupaten/kota yang termasuk klasifikasi III adalah Cilacap, Karanganyar dan Kudus. Artinya walaupun tidak menjadi sektor unggulan namun sebenarnya memiliki keunggulan kompetitif/pertumbuhan cepat. Sedangkan klasifikasi IV yaitu Boyolali yang tidak memiliki keunggulan kompetitif/pertumbuhan lambat, tetapi tidak ada kecamatan yang masuk ke dalam klasifikasi ini.

Gambar 5.6. Sebaran wilayah menurut Analisis Overlay

Sektor Pariwisata Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Tahun 2012-2022



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, data diolah

BAB VI. KESIMPULAN

Jawa Tengah memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan sektor pariwisata, namun jumlah daya Tarik wisata di tiap kabupaten/kota sangat bervariasi. Hotel dan restoran merupakan salah satu faktor penunjang utama kegiatan pariwisata. Hotel dan akomodasi lainnya juga menyebar secara tidak merata di kabupaten/kota se Jawa Tengah. Demikian juga restoran/rumah makan di Jawa Tengah tersebar secara tidak merata di kabupaten/kota.

Potensi pariwisata di Kabupaten/Kota masih belum digali secara optimal, sehingga kontribusinya terhadap pariwisata provinsi Jawa Tengah cenderung masih kecil. Hal ini terlihat dari kontribusinya terhadap sektor pariwisata provinsi, Kota Semarang memiliki kontribusi tertinggi yaitu 11,71 persen, sedangkan kabupaten/kota lain kontribusinya masih di bawah sepuluh persen yaitu berkisar antara 0,5 persen hingga 6 persen.

Hasil analisis dengan rata-rata nilai LQ 2012 hingga 2022, hampir seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah mempunyai sektor unggulan di sektor pariwisata kecuali Kabupaten Cilacap, Boyolali, Karanganyar dan Kudus. Sedangkan hasil Pemetaan Wilayah menurut Kategori LQ, Sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Tengah tergolong klasifikasi daerah dengan pariwisata yang maju, tetapi menurun potensinya Daerah dengan kategori memiliki tingkat persaingan pariwisata yang rendah sekaligus tidak potensial di Jawa Tengah meliputi Boyolali dan Karanganyar.

Hasil analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ) menunjukkan bahwa sektor pariwisata hampir seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah tidak mengalami perubahan posisi sehingga kedepan sektor pariwisata masih tetap menjadi sektor basis yang dapat diunggulkan dan mempunyai daya saing yang tinggi dibandingkan sektor pariwisata terhadap Jawa Tengah.

Hasil analisis gabungan *Location Quotient* (LQ) dan *Dynamic Location Quotient* (DLQ) Sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Tengah

sektor pariwisatanya tidak mengalami perubahan dan tetap menjadi sektor basis dan hanya ada dua kabupaten di Jawa Tengah yang sektor pariwisatanya tetap menjadi non basis yaitu Cilacap dan Kudus.

Dari hasil analisis shift share, seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah memiliki daya saing atau potensi sektor pariwisata yang tinggi, hanya terdapat perbedaan dalam kecepatan pertumbuhan sektor pariwisata. Berdasarkan gabungan analisis LQ dan Shift Share dapat disusun analisis overlay untuk menentukan mendeskripsikan klasifikasi dan tipologi daerah. Sebagian besar kabupaten/kota merupakan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan namun tidak memiliki keunggulan kompetitif/pertumbuhan lambat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Dewitri. 2017. Analisis Hubungan Komplementer Dan Kompetisi Antar Destinasi Pariwisata (Studi Kasus: 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Di Indonesia). Tesis MPKP FEB UI.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2023). Jawa Tengah Dalam Angka 2023. Semarang : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2023). PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jawa Tengah 2022. Semarang : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2023). Statistik Tingkat Penghunian Kamar Hotel Provinsi Jawa Tengah 2022. Semarang : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Jawa Tengah (2023). Buku Saku Pariwisata Jawa Tengah 2022. Semarang : Diporapar Provinsi Jawa Tengah
- Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Jawa Tengah (2023). Buku Statistik Pariwisata Jawa Tengah Dalam Angka 2022. Semarang : Diporapar Provinsi Jawa Tengah.
- Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Jawa Tengah (2022). Renstra Disporapar Provinsi Jawa Tengah 2018-2023. Semarang : Diporapar Provinsi Jawa Tengah.

Heriawan, Rusman. 2004. "Peranan dan Dampak Pariwisata Pada Perekonomian Indonesia : Suatu Pendekatan Model I-O dan SAM". Disertasi. Doktoral Institut Pariwisata Bogor. Bogor.

LPEM, FEB Universitas Indonesia (2018). "Kajian Dampak Pariwisata Terhadap Perekonomian Indonesia". Universitas Indonesia. Jakarta.

<https://jateng.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

JL. Pahlawan No. 6 Semarang 50241

Telp. (024) 8412804, 8412805, Fax 8311195

Homepage : <https://jateng.bps.go.id> E-mail : jateng@bps.go.id